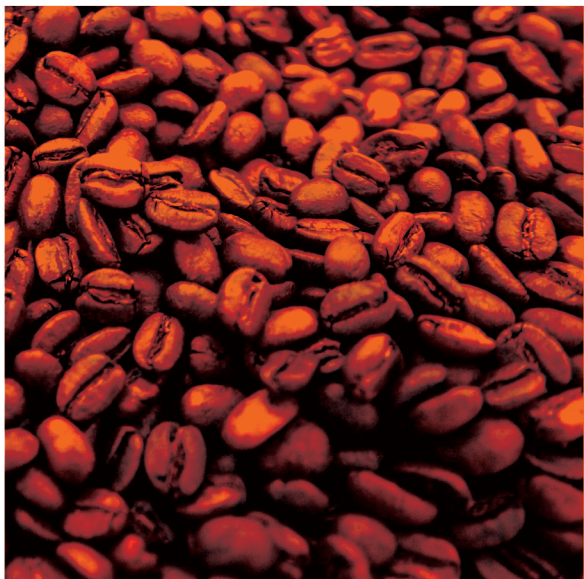




SUFI, S.Sos., M.A.P

IMPLEMENTASI PROGRAM **PEMBERDAYAAN** **PETANI KOPI**

Pada Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan Kota Takengon



IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN PETANI KOPI

Pada Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan
Kota Takengon



universitas
MALIKUSSALEH

Sufi, S.Sos., M.A.P

**IMPLEMENTASI PROGRAM
PEMBERDAYAAN PETANI KOPI**
Pada Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan
Kota Takengon

UNIMAL PRESS

Judul: **IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN PETANI KOPI**, Pada
Koperasi Baitul Qiradh Baburrayan Kota Takengon
viii + 68 hal., 15 cm x 23 cm

Cetakan Pertama: Mei, 2019

Hak Cipta © dilindungi Undang-undang. *All Rights Reserved*

Penulis:

SUFI, S.Sos., M.A.P

Perancang Sampul &

Penata Letak: **Eriyanto**

Pracetak dan Produksi: **Unimal Press**

Penerbit:

UNIMAL PRESS

Unimal Press

Jl. Sulawesi No.1-2

Kampus Bukit Indah Lhokseumawe 24351

PO.Box. 141. Telp. 0645-41373. Fax. 0645-44450

Laman: www.unimal.ac.id/unimalpress.

Email: unimalpress@gmail.com

ISBN:

978 – 602 –464- 071-2

ISBN 978-602-464-071-2



*Dilarang keras memfotocopy atau memperbanyak sebahagian atau
seluruh buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit*

Kata Pengantar

Alhamdulillahirabbilalamin, rasa puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, terutama rahmat kesehatan, ilmu pengetahuan, kesempatan sehingga penulis telah menyelesaikan penulisan Buku ini dengan judul “Implementasi Program Pemberdayaan Petani Kopi” (Studi Pada Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan Kota Takengon) yang merupakan salah satu bagian dari tugas Tridarma Perguruan Tinggi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan meneliti persoalan yang ada di masyarakat.

Dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Dr. Herman Fitra, ST., MT, selaku Rektor Universitas Malikussaleh;
2. M. Akmal, S.Sos., MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh;
3. Al Chaidar, S.IP., M.Si selaku Pimpinan Redaksi UNIMAL Press.
4. Seluruh rekan-rekan Dosen dan Mahasiswa di Program Studi Administrasi Bisnis dan Administrasi Publik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh yang telah ikut menyumbangkan saran serta semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan kepada penyusun.

Demikianlah penyusunan buku ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Bukit Indah, Mei 2019
Penyusun,

Sufi, S.Sos., M.AP
NIP. 198209072008121001

This page is intentionally left blank

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	x
Daftar Table.....	x

BAB I

LATAR BELAKANG.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Fokus Penelitian	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Manfaat Penelitian	4
2.1 Penelitian Terdahulu.....	5
2.2 Landasan Teoritis	6
2.2.1 Pengertian Implementasi	6
2.2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan.....	7
2.2.3 Faktro-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan.....	7
2.2.4 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan.....	9
2.2.5 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	12
2.2.6 Konsep Pemberdayaan Ekonomi	14
2.2.7 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat.....	15
2.2.8 Strategi Pemberdayaan Masyarakat.....	17
2.2.9 Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat.....	18
2.2.10 Unsur-Unsur Pemberdayaan Masyarakat.....	19
2.2.11 Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat.....	20
2.3 Landasan Konseptual	22

BAB III

METODE PENELITIAN.....	25
3.1 Lokasi Peneliatian	25
3.2 Pendekatan Penelitian	25
3.3 Informan Penelitian	26
3.4 Sumber Data	27
3.5 Teknik Pengumpulan Data	27
3.6 Teknik Analisis Data	28
3.7 Jadwal Penelitian.....	29

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Hasil Penelitian.....	31
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
4.1.2 Implementasi Program Pemberdayaan Petani Kopi di Aceh Tengah Pada Koperasi Baitul Qiradh Baburarrayan.	33
4.1.2.1 Keanggotaan Koperasi Baitul Qiradh Baburarrayan Kabupaten Aceh Tengah dengan Membentuk Kelompok Tani	33
4.1.2.2 Menyediakan Lapangan Pekerjaan untuk Masyarakat Setempat	36
4.1.2.3 Sosialisasi dan Pelatihan Bagi Anggota Kelompok Tani	41
4.1.3 Kendala pemberdayaan petani kopi pada koperasi Baitul Qiradh Baburarrayan Aceh Tengah	43
4.1.3.1 Kendala Rendahnya Harga Kopi	43
4.1.3.2 Permainan Harga Oleh Toke Kopi yang Menyebabkan Pemberdayaan Petani Kopi Belum Maksimal	47
4.1.3.3 Masyarakat Petani Kopi Bekerja Tidak Berdasarkan Aturan Koperasi Baitul Qiradh Baburarrayan Aceh Tengah	49
4.2 Pembahasan.....	51
4.2.1. Implementasi Program Pemberdayaan Petani Kopi di Aceh Tengah Pada Koperasi Baitul Qiradh Baburarrayan.	51
4.2.1.1 Keanggotaan Koperasi Baitul Qiradh Baburarrayan Kabupaten Aceh Tengah dengan Membentuk Kelompok Tani	52
4.2.1.2 Menyediakan Lapangan Pekerjaan untuk Masyarakat Setempat	53
4.2.1.3 Sosialisasi dan Pelatihan Bagi Anggota Kelompok Tani	55
4.2.2 Kendala pemberdayaan petani kopi pada koperasi Baitul Qiradh Baburarrayan Aceh Tengah ..	57
4.2.2.1 Kendala Rendahnya Harga Kopi	57
4.2.2.2 Permainan Harga Oleh Toke Kopi yang Menyebabkan Pemberdayaan Petani Kopi Belum Maksimal	58

4.2.2.3 Masyarakat Petani Kopi Bekerja Tidak Berdasarkan Aturan Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan Aceh Tengah.....	61
---	----

BAB V

PENUTUP	63
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65
RIWAYAT PENULIS.....	67

Daftar Gambar

Gambar 4.1	Data Persentase Tingkat Pengangguran dari Tahun 2011 hingga 2018.....	39
------------	---	----

Daftar Table

Tabel 3.1	Daftar Informan	26
Tabel 3.1	Jadwal Kegiatan Penelitian	29
Tabel 4.1	Kelompok Tani <i>Organic Fairtrade & Cafee Practice</i> Kabupaten Aceh Tengah.....	34
Tabel 4.2	Data Jumlah Anggota Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan Tahun 2018	34
Tabel 4.3	Jumlah Tenaga Kerja Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan.....	38
Tabel 4.4	Daftar Harga Kopi di Kabupaten Aceh Tengah	48

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang

Pemberian otonomi daerah kepada setiap provinsi yang ada di Indonesia, bertujuan agar setiap provinsi dapat mengembangkan potensi besar yang ada di daerahnya, tidak hanya itu daerah juga diberikan wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri tanpa ikut campur pihak lain secara langsung. Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang menerima otonomi khusus.

Semenjak diberikan otonomi daerah kepada provinsi Aceh, banyak terjadi perubahan-perubahan di segala bidang, baik dalam instansi pemerintahan, sosial, politik dan ekonomi. Perubahan yang terjadi tetap harus disambut oleh masyarakat, perubahan yang lambat sekali prosesnya dan ada juga perubahan yang cepat ini merupakan suatu hal yang alamiah. Dari hal diatas berakibatnya terjadi pembangunan di segala bidang dan masuknya industrialisasi yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sesuai yang tertuang di dalam UU No 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 5 bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga terjadi pembangunan di segala bidang. Koperasi merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah daerah untuk mengelola daerah dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alamnya. Koperasi memiliki peranan strategis dalam tata ekonomi nasional dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan pancasila dan UUD 1945. UU No 17 Tahun 2012 tentang koperasi merupakan bentuk pengimplementasian ekonomi kerakyatan melalui koperasi yang ditetapkan sebagai salah satu pilar perekonomian nasional bersama perusahaan BUMN.

Setiap koperasi mempunyai tujuan seperti yang termuat dalam pasal 18 ayat 1 dan 2 UU No 17 Tahun 2012 bahwa : (1) Koperasi wajib mempunyai tujuan dan kegiatan usaha yang sesuai dengan

jenis Koperasi dan harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar. (2) Tujuan dan kegiatan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, disusun berdasarkan kebutuhan ekonomi anggota dan jenis Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal empat (4) dijelaskan bahwa koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Banyak jenis dan model koperasi yang dibangun di Indonesia baik di pusat maupun di daerah sesuai dengan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Aceh Tengah adalah satu kabupaten di Aceh yang memiliki banyak koperasi kopi namun yang paling dikenal ada empat koperasi kopi diantaranya Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan (KBQB), Asa Coffe, Ketiaru Kopi dan Mahara Kopi. Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan didirikan pada tanggal 21 Oktober 2002 berdasarkan Badan Hukum No 62.01/233/BH/X/2002 dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan anggotanya, memperbaiki perekonomian masyarakat sekitar dengan memberdayakan sumber daya manusia, dan sektor pembangunan semakin meningkat di Kabupaten Aceh Tengah.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti terlihat bahwa mayoritas masyarakat Aceh Tengah di berbagai kecamatan berprofesi sebagai petani kopi, dari ke 14 kecamatan sebagian besarnya telah menjadi anggota dalam koperasi tersebut dan menyalurkan hasil panennya ke Koperasi Baitu Qiradh Baburrayyan.
Sumber : Analisis penulis

Dataran Tinggi Gayo merupakan daerah penghasil kopi Indonesia dan pengeksport biji kopi terbesar keempat di dunia, yang mampu menghasilkan sekitar 40% biji kopi jenis Arabica tingkat premium dari total panen kopi di Indonesia. Perkebunan Kopi yang telah dikembangkan sejak tahun 1908 berada di ketinggian 1200 m dari permukaan laut, dengan luas mencapai 48.300 ha dengan rata-rata produksi perhektar sebanyak Kg.720. Kopi merupakan salah satu hasil pertanian terbesar di Kabupaten Aceh Tengah, hal ini dapat dilihat hampir setiap orang mempunyai lahan kopi. Kesejahteraan

masyarakat Kabupaten Aceh Tengah sangat bergantung pada tanaman kopi yang sudah mendunia ini.

Bertolak belakang dengan tujuan berdirinya koperasi yaitu memperlihatkan adanya suatu kemajuan pembangunan, perekonomian, dan terberdayanya masyarakat namun hal tersebut belum sesuai dengan realita yang terjadi di Kota Takengon. Meskipun berbagai sertifikasi dari dalam negeri maupun dari luar negeri sudah diperoleh terhadap kopi arabika Gayo, namun masih ada beberapa permasalahan.

Berdasarkan paparan Ibu Rasunah selaku petani kopi di Kota Takengon mereka masih merasa belum puas terhadap harga kopi yang mereka peroleh. Harga 1 Kg gabah kopi Rp. 28.000 bisa berubah menjadi Rp. 25.000. Selain itu, masyarakat juga mengalami kesulitan untuk memasarkan kopi karena terkendala dengan harga yang murah sehingga tingkat kesejahteraan petani belum signifikan. Selama ini hasil panen kopi masyarakat hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari saja. Sehingga sulit untuk ditabung terlebih lagi harga bahan pokok makanan semakin melambung. Masyarakat memiliki kebun kopi tetapi hanya merasakan sedikit keuntungan saja sehingga masyarakat harus membuat usaha di bidang lain. *Sumber : analisis penulis*

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui komoditas kopi Gayo, membutuhkan strategi maupun rencana yang matang dalam pengembangannya. Perlu adanya peran dari pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah, petani dan pengusaha perlu berjalan secara berkesinambungan. Koperasi Baitul Qiradh Baburrayan Aceh Tengah merupakan salah satu koperasi kopi mempunyai peran penting dalam meningkatkan pendapatan petani kopi sampai sekarang ini. Berdasarkan latar belakang permasalahan dan data empiris yang telah penulis paparkan di atas. Maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk memperdalam kajian demi sebuah titik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi program pemberdayaan petani kopi di Aceh Tengah pada koperasi Baitul Qiradh Baburrrayan ?
2. Kendala apa yang dihadapi dalam pemberdayaan petani kopi di Aceh Tengah pada koperasi Baitul Qiradh Baburrrayan?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebelumnya, maka yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Keanggotaan koperasi, bentuk pemberdayaan petani kopi dan kendala pada rendahnya harga kopi.
2. Permainan harga oleh toke kopi yang menyebabkan pemberdayaan petani kopi belum maksimal.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk melihat implementasi program pemberdayaan petani kopi di Aceh Tengah.
2. Untuk mengetahui penyebab program pemberdayaan petani kopi belum maksimal diimplementasikan.

1.5 Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengembangan pengetahuan ilmu Administrasi Negara serta diharapkan menjadi tambahan teori, konsep dan referensi untuk penelitian sejenis selanjutnya tentang implelementasi program pemberdayaan petani kopi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan menjadi masukan bagi Pemerintah Aceh Tengah khususnya Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayan yang memiliki peran penting menunjang sektor perekonomian masyarakat petani kopi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Mahyana (2016) dengan judul Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kopi di Kabupaten Aceh Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani terus mengalami peningkatan baik dari segi pendapatan maupun dari segi pemberian bibit unggul.

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah Aceh Tengah dalam mensejahterakan petani kopi yaitu dengan meningkatkan pengawasan terhadap program kesejahteraan pada petani kopi, memberikan perlindungan terhadap petani bila terjadi gagal panen, meningkatkan sarana dan prasarana, meningkatkan SDM petugas perdagangan dan perindustrian, menyediakan koperasi di setiap desa serta menyediakan resi gudang.

Persamaan penelitian Mahyana dengan penelitian penulis, dalam penelitian ini sama-sama mengkaji tentang kesejahteraan petani kopi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Letak perbedaannya, pada penelitian Mahyana lebih memfokuskan pada kajian kinerja pemerintah untuk melindungi petani kopi dari gagal panen dengan menyediakan resi gudang. Sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada pemberdayaan petani kopi yang dilakukan oleh Koperasi Bitul Qiradh Baburrayyan

Rahmuna (2013) dengan judul Peran Tanaman Cabe Merah dalam Meningkatkan Tarap Kesejahteraan Petani di Desa Gelelungi Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran harga cabe merah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Gelelungi Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah dan untuk mengetahui mekanisme pemasaran dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Gelelungi Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh

Tengah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah quisioner, wawancara dan observasi sedangkan jenis sumber data adalah data primer dan data skunder.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran harga tanaman cabe merah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Gelelungi Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah dan mekanisme apa yang digunakan untuk pemasaran cabe merah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Aceh Tengah.

Persamaan penelitian Ramuna Pasa Yogia dengan penelitian penulis, dalam penelitian ini sama-sama mengkaji tentang harga produk pertanian yang dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Sedangkan letak perbedaannya, pada penelitian Ramuna Pasa Yogia memfokuskan pada mekanisme pemasaran cabe merah dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara quisioner. Sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada kajian Implementasi Program Pemberdayaan Petani Kopi (menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan observasi).

2.2 Landasan Teoritis

2.2.1 Pengertian Implementasi

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak bisa dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain bahwa implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan dari kebijakan itu sendiri.

Menurut Solichin (2008: 65) mengatakan bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus perhatian impelentasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat.

Kemudian, mengenai pengertian implementasi kebijakan, Van Meter dan Van Horn dalam Wibawa (1994:15) memberikan pengertian bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan individu-individu dan kelompok-kelompok pemerintahan yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan.

Ada ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu :

1. Adanya program atau kebijakan yang akan dilaksanakan.
2. Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program.
3. Unsur pelaksana (implementator) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan atau pengawasan dari proses implementasi tersebut.

2.2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Pressmen dan Wildavsky dalam Tangkilisan (2003: 17) implementasi kebijakan diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya. Implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan kebijakan yang diinginkan. Budi Winarno (2002) yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

2.2.3 Faktro-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Menurut Edward III dalam Subarsono (2011: 90), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, diantaranya sebagai berikut;

1. Komunikasi

Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya, implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia yakni kompetensi implementator, dan sumber daya finansial.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementator seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga tidak menjadi efektif.

4. Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu yang paling penting dalam organisasi adalah adanya SOP yang menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak. Struktur organisasi yang panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks sehingga dapat menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

2.2.4 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Ada beberapa faktor penghambat implementasi kebijakan, yaitu :

1. Sulitnya memperoleh informasi yang cukup dan benar tentang persoalan yang dihadapi membuat pimpinan sulit untuk menentukan kebijakan yang sesuai dengan persoalan yang sedang dihadapi.
2. Bukti yang sulit disimpulkan, persoalan yang kompleks dihadapi menimbulkan kesulitan bagi pengambil kebijakan untuk menentukan sikap terhadap masalah.
3. Adanya berbagai macam kepentingan yang berbeda pula. Kepentingan yang beragam membuat pemimpin sulit mengambil keputusan yang membuat semua diwakilkan terhadap semua masalah yang dihadapi.
4. Dampak kebijakan sulit dikenali, kebijakan yang telah ditetapkan tidak semuanya memberi dampak seperti yang diharapkan, perubahan lingkungan sangat memberi imbas atas keberhasilan pada implementasi kebijakan.
5. Umpan balik keputusan bersifat sporadis dan proses perumusan kebijakan tidak dimengerti dengan benar.

Kebijakan menjadi hal yang sulit ditentukan oleh seorang pemimpin, sehingga keahlian dalam melihat situasi dan kondisi perlu dimiliki oleh seorang pemimpin yang membuat pimpinan mampu membuat kebijakan yang bisa memberi kemajuan bagi organisasi, walaupun kebijakan yang ditempuh memiliki dampak negatif dalam implementasinya.

Menurut Suggono (1994: 149) implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu :

1. Isi kebijakan. Pertama implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-saran dan penerapan prioritas atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplemetasikan dapat juga

menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, kekuarangan sumber daya pembantu seperti waktu, biaya dan tenaga manusia.

2. Informasi. Implementasi kebijakan publik mengansumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan peranya dengan baik.
3. Dukungan. Pelaksana suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengmplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.
4. Pembagian potensi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai dengan adanya pembatasan-pembatasan yang kuran jelas.

Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang lebih banyak mendapatkan penolakan masyarakat dalam implementasinya. Menurut Anderson dalam Suggono (1994 : 144) faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat untuk tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu :

1. Adanya konsep keidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang kurang mengikat individu-individu.
2. Anggota masyarakat memiliki gagasan yang tidak sesuai dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah.
3. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan melanggar aturan hukum.
4. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan ukuran kebijakan yang mungkin saling bertentangan dengan satu sama lain, yang bisa menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik.

5. Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok.

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota masyarakat. Dengan kata lain tindakan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan negara maka kebijakan publik tidaklah efektif.

Untuk mengamati hasil pengamatan terhadap implementasi kebijakan, menurut Wibawa (1994 : 94) dikemukakan ada tiga buah model implementasi kebijakan yaitu :

1. Model Van Meter dan Van Horn merumuskan sebuah abstraksi yang memperhatikan hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja suatu kebijakan, implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja yang tinggi berlangsung dalam hubungan berbagai faktor.
2. Model implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle memandang implementasi kebijakan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi dari kebijakan merupakan faktor penting dalam menentukan hasil dan prakarsa implementasi, namun dikatakan oleh kondisi sosial dan ekonomi yang ada.

Variabel isi kebijakan mencakup :

- 1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* yang termuat dalam kebijakan;
- 2) Jenis atau manfaat yang diterima oleh *target group* misalkan masyarakat. Misalnya suatu daerah lebih suka menerima program air bersih daripada menerima program kredit sepeda motor;
- 3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit

diimplementasikan daripada program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat;

- 4) Apakah letak sebuah program sudah tepat berada pada posnya, lembaga atau sesuai dengan tupoksinya;
- 5) Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci; dan
- 6) Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Variabel lingkungan implementasi kebijakan mencakup :

- 1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
- 2) Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa;
- 3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Model yang dikembangkan oleh Mazmanian dan Sabatier memandang implementasi kebijakan 3 (tiga) fungsi yaitu : 1) karakteristik masalah, 2) struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasikan kebijakan, 3) faktor-faktor di luar peraturan.

Berdasarkan teori di atas maka penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada perilaku badan yang bertanggung jawab melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan pada kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang tidak terlibat dan akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

2.2.5 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat menurut Kartasasmita dalam Lucie Setiana (2004 : 6) adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Menurut Sulistiyan dalam Aflia Rizky (2016 : 11) secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses menuju berdaya atau pemeberian daya (kekuatan/kemampuan) kepada pihak yang belum berdaya. Pengertian tentang masyarakat menurut Soetomo dalam Aflia Rizky (2016 : 11) masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara kontinyu, sehingga terdapat relasi sosial yang terpola dan terorganisasi.

Menurut Kartasasmita (1996 : 194) pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang mempunyai akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan prikehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus-menerus, proses partisipatif dimana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi, pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses.

Pemberdayaan masyarakat juga merupakan sebagai sebuah bentuk partisipasi untuk membebaskan diri mereka sendiri dari ketergantungan menal dan fisik. Partisipasi masyarakat menjadi satu elemen pokok dalam strategi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat dengan alasan; pertama, partisipasi merupakan suatu perangkat ampuh untuk mengalokasi sumber daya lokal, mengorganisir serta membuka tenaga, kearifan dan kreativitas masyarakat. Kedua; partisipasi masyarakat juga membantu upaya identifikasi dini terhadap kebutuhan masyarakat.

Mengacu pada pengertian teori di atas, dalam penelitian ini pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya sehingga masyarakat dapat mencapai kemandiriannya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya unuk meningkatkan daya

atau kekuatan pada masyarakat dengan cara memberi dorongan, peluang, kesempatan dan perlindungan dengan tidak mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat yang diberdayakan untuk mengembangkan potensinya sehingga masyarakat tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi melalui berbagai aktivitas.

2.2.6 Konsep Pemberdayaan Ekonomi

Terdapat beberapa konsep pemberdayaan ekonomi secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri.
2. Pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala perkembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
3. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktural, meliputi : a) pengalokasian sumber daya, b) penguatan kelembagaan, c) penguasaan teknologi, d) pemberdayaan sumber daya manusia.
4. Pemberdayaan ekonomi rakyat tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerja sama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
5. Kebijakan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah : a) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); b) memperkuat posisi transaksi

dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekedar *price taker*; c) pelayanan pendidikan dan kesehatan; d) penguatan industri kecil; e) mendorong munculnya wirausaha baru; f) pemerataan spasial.

6. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: a) peningkatan akses bantuan modal usaha; b) peningkatan akses pengembangan SDM; c) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

2.2.7 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sulistiyani dalam Aflia Rizky (2016 : 121) tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka secara bertahap masyarakat akan memperoleh daya dari waktu ke waktu.

Menurut Tjkowinoto (1996 : 22) yang dirumuskan dalam tiga bidang yaitu ekonomi, politik, dan sosial budaya; kegiatan pemberdayaan harus dilaksanakan secara menyeluruh mencakup segala aspek kehidupan masyarakat untuk membebaskan kelompok masyarakat dari dominasi kekuasaan yang meliputi bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Konsep pemberdayaan di bidang ekonomi adalah usaha menjadikan ekonomi yang kuat, besar, mandiri, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang besar dimana terdapat proses penguatan ekonomi lemah.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat bertujuan memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan, dan ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi.

Memberdayakan mengandung arti melindungi, sehingga dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah agar tidak

bertambah lemah. Karena itu diperlukan strategi pembangunan yang memberikan perhatian yang lebih banyak dengan mempersiapkan lapisan masyarakat yang masih tertinggal dan hidup di luar dan di pinggiran jalur kehidupan modern sehingga tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi dan kemampuan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki, tetapi juga sekaligus meningkatkan kemampuan ekonomi nasional.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sumber daya manusia/masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalian kemampuan pribadi, kreatifitas, kopetensi dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari waktu sebelumnya. Pemberdayaan masyarakat sangat penting dan merupakan hal yang wajib untuk dilakukan mengingat pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang demikian pesatnya belakangan ini akan mempengaruhi kemampuan tiap individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu masyarakat luas diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman dengan adanya pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk :

1. Menciptakan lingkungan yang memiliki etos kerja yang lebih baik sehingga mampu menciptakan kondisi kerja yang sehat dan saling menguntungkan.
2. Melahirkan individu-individu yang mandiri dalam masyarakat.
3. Melatih dan memampukan masyarakat untuk melakukan perencanaan dan pertanggungjawaban atas tindakan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
4. Menambah kemampuan berpikir dan bernegosiasi atau mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin menjadi ditemui dalam lingkungan.
5. Memperkecil angka kemiskinan dengan cara meningkatkan potensi dan kemampuan dasar yang dimiliki masyarakat.

Indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat mencakup:

1. Jumlah warga yang secara nyata tertarik untuk hadir dalam tiap kegiatan yang dilaksanakan.

2. Frekuensi kehadiran tiap-tiap warga pada pelaksanaan tiap jenis kegiatan.
3. Tingkat kemudahan penyelenggaraan program untuk memperoleh pertimbangan atau persetujuan warga atas ide baru yang dikemukakan.
4. Jumlah dan jenis ide yang dikemukakan oleh masyarakat yang ditujukan untuk kebenaran pelaksanaan program.
5. Jumlah dana yang dapat digali dari masyarakat untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan.
6. Intensitas kegiatan petugas dalam pengendalian masalah.
7. Meningkatnya kepedulian dan respon terhadap perlunya peningkatan mutu hidup.
8. Meningkatnya kemandirian masyarakat.

2.2.8 Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan pendapat Sunyoto Usman (2008 : 22) ada beberapa strategi yang dapat menjadi pertimbangan untuk dipilih dan kemudian diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu menciptakan iklim, memperkuat daya dan melindungi. Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia memiliki potensi atau daya yang dapat dikembangkan.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*), upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, lapangan kerja dan pasar.
3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah.

Bila dilihat dari mekanismenya dan prosesnya perumusan program pemberdayaan masyarakat, pendekatan pemberdayaan cenderung mengutamakan alur dari bawah ke atas atau lebih dikenal

dengan pendekatan *bottom up*. Pendekatan ini merupakan upaya melibatkan semua pihak sejak awal, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan mereka bersama, dan mendorong keterlibatan dan komitmen sepenuhnya untuk melaksanakannya.

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka perencanaan dan penentuan kebijakan atau dalam pengambilan keputusan. Model pendekatan dari bawah mencoba melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Pendekatan yang dilakukan tidak berangkat dari luar melainkan dari dalam. Seperangkat masalah dan kebutuhan dirumuskan bersama, sejumlah nilai dan keputusan dipahami bersama.

2.2.9 Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar pendamping masyarakat, sebagai berikut :

1) Belajar dari Masyarakat

Prinsip yang paling mendasar adalah prinsip bahwa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat adalah dari, oleh dan untuk masyarakat. Ini berarti, dibangun pada pengakuan serta kepercayaan akan nilai dan relevansi pengetahuan tradisional masyarakat serta kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah-masalahnya sendiri.

2) Pendamping sebagai Fasilitator

Masyarakat sebagai pelaku konsekuensi dari prinsip pertama adalah perlunya pendamping menyadari perannya sebagai fasilitator dan bukannya sebagai pelaku atau guru. Untuk itu perlu sikap rendah hati serta ketersediaan untuk belajar dari masyarakat dan menempatkan warga masyarakat sebagai narasumber utama dalam memahami keadaan masyarakat itu. Bahkan dalam penerapannya masyarakat dibiarkan mendominasi kegiatan. Walaupun pada awalnya peran pendamping lebih besar, harus diusahakan agar secara bertahap peran itu bisa berkurang dengan

mengalihkan prakarsa kegiatan-kegiatan pada warga masyarakat itu sendiri.

3) Saling Belajar

Saling berbagi pengalaman salah satu prinsip dasar pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat adalah pengakuan akan pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat. Hal ini bukanlah berarti bahwa masyarakat selamanya benar dan harus dibiarkan tidak berubah. Kenyataan objektif telah membuktikan bahwa dalam banyak hal perkembangan dan pengetahuan tradisional masyarakat tidak sempat mengejar perubahan-perubahan yang terjadi dan tidak lagi dapat memecahkan masalah-masalah yang berkembang. Namun sebaliknya, telah terbukti pula bahwa pengetahuan modern dan inovasi dari luar yang diperkenalkan oleh orang luar tidak juga memecahkan masalah mereka.

2.2.10 Unsur-Unsur Pemberdayaan Masyarakat

Unsur-unsur pemberdayaan masyarakat perlu memperhatikan sedikit 4 (empat) unsur pokok, yaitu :

1. Aksesibilitas informasi, karena informasi merupakan kekuasaan baru kaitannya dengan peluang, layanan, penegakan hukum, efektivitas, negosiasi, dan akuntabilitas.
2. Keterlibatan atau partisipasi yang menyangkut siapa yang dilibatkan dan bagaimana mereka dilibatkan dalam keseluruhan proses pembangunan.
3. Akuntabilitas, kaitannya dengan pertanggungjawaban publik atas segala kegiatan yang dilakukan dengan mengatasnamakan rakyat.
4. Kapasitas organisasi lokal, kaitannya dengan kemampuan kerja sama, mengorganisir warga masyarakat, serta memobilisasi sumber daya untuk memecah masalah yang sedang mereka hadapi.

Syarat pemberdayaan masyarakat

1. Membentuk pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat lemah, miskin, rentan, marjinal,

dan kaum kecil seperti petani kecil, buruh tani, masyarakat miskin perkotaan, masyarakat adat yang terbelakang, kaum cacat dan kelompok wanita yang dikesampingkan.

2. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka dan juga sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Sasaran-sasaran pemberdayaan masyarakat

1. Terbukanya kesadaran dan tumbuhnya keterlibatan masyarakat dalam mengorganisir diri untuk kemajuan dan kemandirian bangsa.
2. Diperbaikinya kondisi sekitar kaum rentan, miskin dengan kegiatan-kegiatan peningkatan pemahaman, peningkatan pendapatan, dan usaha-usaha kecil di berbagai bidang ekonomi ke arah swadaya.
3. Ditingkatkan kemampuan dan kinerja kelompok-kelompok swadaya dalam keterampilan teknis dan manajemen untuk perbaikan produktivitas dan pendapatan masyarakat.

Ekonomi rakyat merupakan kegiatan ekonomi produktif yang dikerjakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Keberadaan ekonomi rakyat sebagai landasan pembangunan ekonomi nasional yang harus dibangun, dilindungi, diberdayakan dan ditumbuhkembangkan untuk kesejahteraan rakyat. Pertumbuhan ekonomi yang baik dan berkualitas sebagai syarat cukup dalam pembangunan ekonomi, sudah pasti dibutuhkan pemberdayaan masyarakat secara lebih nyata. Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah proses perolehan pelaku ekonomi untuk mendapat *surplus value* sebagai hak manusia yang terlibat dalam kegiatan produksi.

2.2.11 Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat

1. Perkembangan penduduk dan tingkat pendidikan rendah.

Perkembangan penduduk dapat menjadi pendorong maupun penghambat pemberdayaan. Perkembangan penduduk yang lambat

tidak selalu menjadi penghambat dalam pembangunan ekonomi jika penduduk tersebut mempunyai kapasitas untuk menyerap dan menghasikan produksi yang dihasilkan.

2. Perekonomian Bersifat Dualistik

Perekonomian yang bersifat dualistik merupakan hambatan karena menyebabkan produktivitas berbagai kegiatan produktif sangat rendah dan usaha-usaha untuk mengadakan perubahan sangat terbatas sekali. Yang paling rawan adalah hambatan berupa dualisme sosial dan teknologi yang sangat berpengaruh terhadap mekanisme pasar sehingga sumber daya yang tersedia tidak digunakan secara efektif dan efisien.

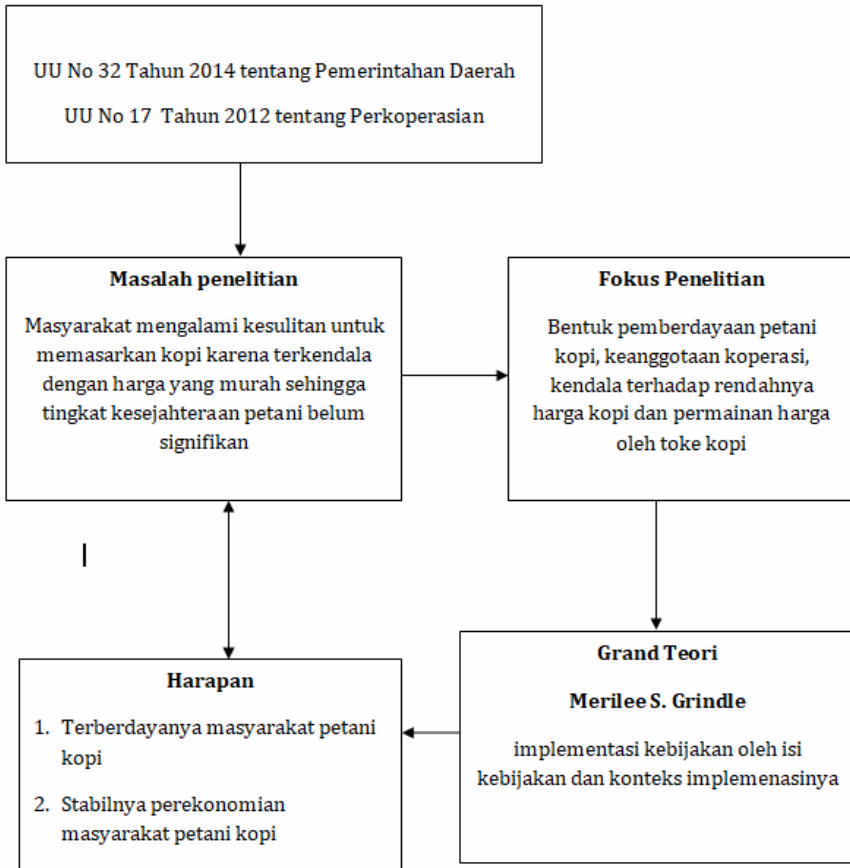
3. Tingkat pembentukan modal rendah

Tingkat pembentukan modal rendah merupakan hambatan utama bagi pembangunan ekonomi. Produktivitas yang sangat rendah mengakibatkan rendahnya pendapatan riil. Pendapatan yang sangat rendah mengakibatkan rendahnya pembentukan modal. Pendapatan yang rendah mengakibatkan rendahnya tabungan pula. Tabungan yang rendah akan melemahkan pembentukan modal yang pada akhirnya kekurangan modal, masyarakat terbelakang, kekayaan alam yang belum dapat diolah, dan seterusnya sehingga merupakan lingkaran yang tidak berujung pangkal.

4. Struktur ekspor berupa bahan mentah

Publish dan Singer dalam Ajriati (2016: 24) mengatakan bahwa dalam jangka panjang daya tukar barang-barang yang diperdagangkan oleh negara yang sedang berkembang dengan negara maju akan menjadi bertambah buruk dan merugikan negara yang sedang berkembang.

2.3 Landasan Konseptual



Pemberian otonomi daerah kepada setiap provinsi bertujuan agar setiap provinsi dapat mengembangkan potensi besar yang ada di daerahnya. Sesuai yang tertuang dalam UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Begitu juga dengan Koperasi yang berkembang di Di Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan UU No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan

bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Bertolak belakang dengan tujuan berdirinya koperasi yaitu memperlihatkan adanya suatu kemajuan pembangunan, perekonomian, dan terberdayanya masyarakat namun hal tersebut belum sesuai dengan realita yang terjadi di Kota Takengon. Berdasarkan paparan masyarakat mereka masih merasa belum puas terhadap harga kopi yang mereka peroleh. Selain itu, masyarakat juga mengalami kesulitan untuk memasarkan kopi karena terkendala dengan harga yang murah sehingga tingkat kesejahteraan petani belum signifikan. Selama ini hasil panen kopi masyarakat hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari saja. Masyarakat memiliki kebun kopi tetapi hanya merasakan sedikit keuntungan saja sehingga masyarakat harus membuat usaha di bidang lain. Pada intinya masyarakat menderita walaupun berada di ladang sendiri.

*

This page is intentionally left blank

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang sebenarnya, penelitian ini dilakukan di Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayyan Kota Takengon tepatnya berada di Desa Weh Nareh Kecamatan Pegasing. Terdapat dua alasan memilih lokasi ini yaitu alasan subjektif dan objektif. Alasan subjektif memilih lokasi ini karena peneliti bertempat tinggal di Kota Takengon sehingga bisa mempermudah proses lancarnya sebuah penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang akan diteliti. Sedangkan alasan objektif peneliti memiliki lokasi ini karena memang benar adanya permasalahan yang perlu adanya suatu langkah penyelesaian berkaitan dengan Implementasi Program Pemberdayaan Petani Kopi.

Aceh Tengah dikenal sebagai daerah penghasil kopi dan mampu memenuhi permintaan konsumen hingga ke luar negeri. Keadaan ini memberikan nilai positif bagi pembangunan daerah karena banyaknya modal yang mengalir ke wilayah Aceh Tengah dari hasil ekspor kopi tersebut sehingga masyarakat dapat diberdayakan. Prosesi ekspor kopi tersebut berpusat di Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayyan yang bekerja sama dengan berbagai pihak. Walaupun begitu banyak penghargaan yang telah di raih oleh Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayyan. Namun hingga kini masyarakat masih belum puas dengan harga gabah kopi dan kebanyakan uang yang tinggal itu di pengusaha-pengusaha sementara masyarakat hanya memperoleh sedikit saja.

3.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, di mana hasil penelitian diharapkan akan memberikan gambaran atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap objek yang akan diteliti. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2005) adalah suatu proses penelitian

ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam kontek sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan yang terperinci daripada sumber informasi, serta dilakukan dalam *setting* yang alamiah tanpa adanya intervensi apapun dari peneliti.

Metode deskriptif adalah sebagai prosedur pemecahan masalah yang akan diteliti dengan menggambarkan subjek atau objek berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Dengan demikian metode deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan metode yang berusaha mendeskriptifkan fakta-fakta yang ditemui di lapangan.

3.3 Informan Penelitian

Penentuan informan disesuaikan dengan kebutuhan data yang diperlukan dalam mendukung tercapainya tujuan penelitian. Informen dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Narbuko dan Ahmadi (2010 : 116) teknik *purposive sampling* adalah teknik yang dilakukan berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki oleh subjek yang dipilih karena ciri-ciri tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.

Tabel 3.1.
Daftar Informan

No	Nama informan	Jabatan	Tempat
1	Iwannitosa Putra	Bagian Humas	Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayan
2	Ismayani	Badan Pengurus	Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayan
3	Rizwan Husin	Badan Pengurus	Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayan
4	Qamaruddin	Ketua Kelompok Tani	Kecamatan Pegasing
5	Kamaluddin	Angpta Kelompok Tani	Kecamatan Pegasing
6	Hendrika Fauzi	Tokoh Pengamat Kopi Sekaligus Duta	Kota Takengon

		Kopi Gayo	
7	Rasunah	Masyarakat Petani Kopi	Desa Wihlah
8	Hasanuddin	Masyarakat Petani Kopi	Desa Wihlah
9	Yusuf	Masyarakat Petani Kopi	Desa Wihlah
10	Masniar	Buruh Sortir Kopi	Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayan
11	Sulastri	Buruh Sortir Kopi	Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayan

3.4 Sumber Data

Sumber data menurut Lofland dalam Basrowi dan Suwandi (2008: 169) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Pada bagian ini jenis data dibagi ke dalam kata-kata, tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber data primer dan sumber data skunder, yaitu :

1. Data primer yaitu data berupa teks hasil wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya, dan data observasi yang dilakukan penulis saat turun ke lapangan.
2. Data skunder yaitu berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Termasuk dalam kategori data skunder seperti dokumen, pengumuma, surat-surat.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang berkaitan dengan permasalahan implementasi program

peremberdayaan petani kopi di Koperasi Baitul Qiradh Baburayan Aceh Tengah.

2. Wawancara. Menurut Moleong (2005:112) wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teknik wawancara
 - 1) teknik wawancara terstruktur yaitu hal-hal yang ditanyakan telah terstruktur dan telah ditetapkan sebelumnya secara rinci dengan mempersiapkan pedoman wawancara. Teknik ini dilakukan pada Koperasi Baitul Qiradh Baburayan
 - 2) Dan teknik wawancara snowball yang ditujukan kepada masyarakat petani kopi.
3. Dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data berupa dokumen yang dianggap penting, seperti lampiran, surat, gambar, audio, audio visual, dan lain sebagainya.

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan model analisis kualitatif mengikuti konsep yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Miles dan Huberman dalam Basrowi dan Suwandi (2008: 209) mengemukakan bahwa analisis data penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu reduksi data, penyajian data (*display*) dan mengambil kesimpulan lalu diverifikasi.

1. Mereduksi dan mengategorikan data, merupakan proses seleksi, penyederhanaan dan abstraksi dari data di lapangan, proses berlangsung secara terus menerus sepanjang pelaksanaan penelitian. Penulis memisahkan data-data yang telah dikumpulkan untuk memudahkan dalam menganalisa pada tahap selanjutnya.
2. Penyajian yaitu menghubungkan dan membandingkan data dari lapangan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen terhadap data tersebut, guna membagi konsep yang ada sehingga mempunyai makna secara keseluruhan. Penulis

melanjutkannya dengan membandingkan data-data lapangan dengan data lainnya untuk mendapatkan sebuah konsep yang jelas dalam membuat sebuah pembahasan.

3. Pengambilan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil intepretasi dari data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi. Penulis menarik beberapa kesimpulan awal terkait engan hasil penelitan yang telah dilakukan.
4. Melakukan verifikasi atau penafsiran ulang terhadap kesimpulan-kesimpulan yang telah diambil, guna menghindari kesalahan interpretasi terhadap data yang telah diambil kemudian mematangkan hasil yang telah diperoleh. Penulis perlu melakukan verifikasi ulang terhadap kesimpulan awal, selanjutnya akan melahirkan sebuah kesimpulan baru yang benar-benar sesuai dengan fokus penelitian.

3.7 Jadwal Penelitian

Untuk mendukung kegiatan penelitian ini, peneliti melakukan tahapan-tahapan dalam proses untuk pengembangan suatu penelitian yang berdasarkan data-data yang telah disebutkan di atas. Adapun jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Jadwal Kegiatan Penelitian

Uraian kegiatan	Bulan/Tahun /2018							
	5	6	7	8	9	10	11	12
Persiapan Penelitian								
Pengumpulan Data								
Penyusunan Proposal								
Penelitian Lapangan								
Analisis Data								
Pembuatan Laporan Penelitian								

*

This page is intentionally left blank

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dataran Tinggi Gayo merupakan daerah penghasil kopi Indonesia dan pengeksport biji kopi terbesar keempat di dunia. Perkebunan Kopi yang telah dikembangkan sejak tahun 1908 berada di ketinggian 1200 m dari permukaan laut, dengan luas mencapai 39.000 ha.

Kabupaten Aceh Tengah terletak diantara 4° 10' 33"-5° 57' 50" lintang utara dan diantara 95° 15' 40"-97° 20' 25" bujur timur. Dengan luas wilayah 4.318, 39 Km². Kabupaten Aceh Tengah berada pada ketinggian 200-2.600 m di atas permukaan laut. Bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Nagan Raya.

Di Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari 14 Kecamatan. Salah satu daripada kecamatan tersebut dijadikan sebagai lokasi penelitian penulis yang berkaitan dengan pemberdayaan petani kopi. Pegasing adalah kecamatan yang di dalamnya terdapat sebuah koperasi yang dibentuk sejak tahun 21 Oktober 2002. Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayan dibentuk oleh kelompok dan dibantu oleh pemerintah setempat dalam memberikan legalitas berdirinya suatu koperasi di Aceh Tengah. Koperasi ini bertempat di Desa Weh Nareh.

Visi dan Misi Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayan

Visi

- 1) Menjadikan Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayan menjadi koperasi yang mandiri.

Misi

- 1) Menggiatkan anggota untuk menabung pada Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayan.
- 2) Memberikan pelayanan kepada anggota.
- 3) Membina dan mengembangkan usaha para anggota agar menjadi kuat dan mandiri.
- 4) Mengadakan jaringan kerja sama usaha antar koperasi dengan lembaga lainnya.
- 5) Mengadakan upaya-upaya lain di bidang ekonomi dan keuangan yang dapat menunjang perkembangan usaha koperasi.

Manajemen

Badan Manajemen terdiri dari :

- 1) Kadisperindag Aceh dan Kadisperindakop ESDM Aceh Tengah.
- 2) Dinas Koperasi dan UKM Aceh.
- 3) Kadisbunhut Aceh dan Kadisbunhut Aceh Tengah.
- 4) Kabinet Setda Aceh dan Kabag Ekonomi Setdakab Aceh Tengah.
- 5) Ketua Dekopinwil Aceh dan Ketua Dekopinwil Aceh Tengah.
- 6) Ketua Forum Kopi Aceh Tengah.

Badan Pengawas

Badan pengawas terdiri dari :

- 1) Ketua : Mhd. Hanif
- 2) Anggota : Ismayani
- 3) Anggota : Sartika Yanti

Badan Pengurus

Badan pengurus terdiri dari :

- 1) Ketua : Rizwan Husin
- 2) Sekretaris : Armiyadi
- 3) Bendahara : Sugiati

4.1.2. Implementasi Program Pemberdayaan Petani Kopi di Aceh Tengah Pada Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayyan.

4.1.2.1 Keanggotaan Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayyan Kabupaten Aceh Tengah dengan Membentuk Kelompok Tani

Keanggotaan koperasi Baitul Qiradh Baburrrayyan terdiri dari anggota tetap. Anggota kelompok tani tersebut dipilih berdasarkan persetujuan ketua kelompok tani yang sering disebut dengan kolektor kopi. Kelompok tani yang sudah tergabung dalam keanggotaan Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayyan Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari tiga belas (13) kecamatan.

Hasil wawancara penulis dengan salah satu anggota kelompok tani sekaligus tim delegasi daripada Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayyan Kabupaten Aceh Tengah terkait dengan keanggotaan di Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayyan Kabupaten Aceh Tengah, Bapak Kamaluddin menuturkan sebagai berikut.

“Saya adalah salah satu anggota daripada kelompok tani Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayyan Kabupaten Aceh Tengah, jumlah keseluruhan anggota adalah 52 orang dan diketuai oleh satu orang. Tugas daripada ketua tersebut adalah mengumpulkan kopi dari masyarakat untuk disalurkan kepada pihak Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayyan yang disebut sebagai kolektor kopi”. (Wawancara, 9 Januari 2017).

Kutipan wawancara tersebut diketahui bahwa jumlah setiap anggota kelompok tani adalah 52 orang yang diketuai oleh 1 orang. Antara anggota dan ketua kelompok berbeda dalam pelaksanaan tugas. Ketua selaku kolektor kopi bertugas mengumpulkan kopi daripada anggotanya untuk disalurkan kepada Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayyan Kabupaten Aceh Tengah.

Tabel 4.1
Kelompok Tani *Organic Fairtrade & Cffee Practice*
Kabupaten Aceh Tengah

No	KECAMATAN	KLP	PETANI	HA
1	Pegasing	17	111.1	1.289.32
2	Bintang	10	351	310.20
3	Silih Nara	9	485	555.00
4	Ruseb Antara	5	291	464.30
5	Atu Lintang	11	673	811.55
6	Bebesen	4	119	88.60
7	Kute Panang	3	138	164.20
8	Kebayakan	6	317	226.00
9	Jagong	6	228	219.10
10	Linge	2	91	116.60
11	Celala	2	188	222,00
12	Ketol	4	288	265.00
13	Lot Tawar	2	175	176.50
Total		81	4,395	4,948.37

Sumber : Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayan Kabupaten Aceh Tengah, 2018

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa anggota tetap kelompok tani yang tergabung di bawah Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayan Kabupaten Aceh Tengah sejumlah 13 kecamatan. Dibandingkan dengan kecamatan yang lain, kecamatan dengan luas lahan lebih besar adalah Kecamatan Pegasing yaitu seluas 1.289.32 Ha, yang terdiri dari 17 anggota kelompok tani dan 1.111 petani.

Tabel 4.2
Data Jumlah Anggota Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayan
Tahun 2018

1	Kelompok Pendiri	12
2	Kelompok Karyawan	32
3	Petani Kopi Sertifikasi	5.752
4	Kelompok Umum	195
Total		5.981

(sumber : Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayan Aceh Tengah)

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa saat sekarang ini jumlah anggota Koperasi Baitul Qiradh Baburarrayan Tahun 2018 terdiri dari kelompok pendiri 12 orang, kelompok karyawan 32 orang, kelompok petani kopi sertifikasi 5.752 orang dan kelompok umum sejumlah 195 orang. Sehingga total secara keseluruhan anggota Koperasi Baitul Qiradh Baburarrayan Tahun 2018 berjumlah 5.891 orang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kamaluddin beliau pun menambahkan kembali penjelasannya :

“Selain sebagai anggota kelompok tani, saya juga memiliki fungsi ganda dalam kelompok tani yaitu selaku tim delegasi yang dipercayakan pihak Koperasi Baitul Qiradh Baburarrayan Aceh Tengah untuk memantau apa saja kegiatan masyarakat yang berada di dalam kelompok tani tersebut. Salah satu contohnya adalah melaporkan hasil survei di kebun-kebun petani kepada pihak Koperasi Baitul Qiradh Baburarrayan apakah bekerja sesuai petunjuk atau tidak”. (Wawancara, 9 Januari 2017).

Lebih lanjut lagi memahami tentang keanggotaan kelompok tani. Hasil wawancara di atas dengan Bapak Kamaluddin dapat penulis jabarkan bahwa selain sebagai anggota kelompok tani beliau juga menjabat sebagai tim delegasi yang membantu pihak Koperasi Baitul Qiradh Baburarrayan Kabupaten Aceh Tengah memantau setiap prosesi yang berlangsung di lapangan. Hasil pantauan tersebut secara rutin beliau laporkan kepada pihak Koperasi. Apakah petani tersebut bekerja sesuai aturan dan arahan sebelumnya. Sehingga pihak Koperasi Baitul Qiradh Baburarrayan Kabupaten Aceh Tengah bisa mengambil tindakan selanjutnya terhadap hasil pantauan tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu kolektor kopi di Kecamatan Pegasing yaitu Bapak Qamarruddin terkait keanggotaan kelompok tani Koperasi Baitul Qiradh Baburarrayan Kabupaten Aceh Tengah, beliau pun menjelaskan :

“Kami di dalam satu kelompok berjumlah 52 orang dan itu semua ditentukan oleh ketua kelompok siapa saja yang akan dimasukkan ke dalam kelompok tani tersebut. Ketua kelompok tersebut dinamakan kolektor yang bertugas mensuplay kopi ke Koperasi Baitul Qiradh

Baburrrayan Aceh Tengah. Masing-masing anggota tersebut ditempatkan di setiap desa. Ketika capaian kopi tersebut sesuai target, misalnya saya selaku kolektor kopi tersebut berhasil mendistribusikan kopi sebanyak 1 Ton kopi maka pihak kolektor beserta anggotanya mendapat reward dari pihak koperasi. Baik dalam bentuk uang tunai ataupun biaya gratis perjalanan ke luar kota selama seminggu. Contohnya seperti ke Bandung, Jakarta, Bogor". (Wawancara, 9 Januari 2017).

Hasil wawancara dengan Bapak Qamarruddin selaku kolektor kopi menunjukkan bahwa jumlah anggota secara keseluruhan kelompok tani berjumlah 52 orang dan itu semua ditentukan oleh ketua kelompok itu sendiri dilihat berdasarkan kemampuan anggota mengumpulkan kopi ke kolektor tersebut. Anggota kelompoknya berada di setiap desa di Kecamatan Pegasing. Anggota kelompok tersebut bekerja berdasarkan target. Apabila mereka berhasil bekerja mencapai target tersebut mereka akan diberikan penghargaan baik berupa uang tunai ataupun melakukan perjalanan ke luar kota yang dibiayai oleh Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayan Kabupaten Aceh Tengah.

4.1.2.2 Menyediakan Lapangan Pekerjaan untuk Masyarakat Setempat

Pada dasarnya pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Memberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang mempunyai akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan prikehidupan mereka.

Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus-menerus, proses partisipatif di mana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi, pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses.

Pemberdayaan petani kopi yang dilaksanakan oleh Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan terdiri dari beberapa pembagian sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sehingga dengan adanya kerja sama berbagai pihak tujuan terberdayanya masyarakat secara signifikan dapat tercapai.

Hasil wawancara penulis dengan Ibu Masniar selaku pegawai/pekerja di Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan Kabupaten Aceh Tengah mengenai pemberdayaan petani kopi yang dilakukan oleh Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan Kabupaten Aceh Tengah, beliau menjelaskan :

“Ada 3 program pemberdayaan petani kopi yang dilakukan Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan Kabupaten Aceh Tengah. Program tersebut dibagi berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ada program yang dikhususnya kepada buruh pabrik (selaku penyortir kopi) yaitu berupa penyediaan lapangan pekerjaan. Kemudian sejak tahun 2009 hingga sekarang ada program pemberdayaan yang ditujukan kepada kelompok tani yang terdiri dari pemberian bibit kopi unggulan, pemberian pupuk, pemberian peralatan bercocok tanam seperti cangkul dan yang terakhir adalah melakukan sosialisasi kepada kelompok tani. Capaian tingkat keberhasilan daripada program pemberdayaan ini dapat dilihat dari persentase jumlah pengangguran saat ini hanya 35% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya”. (Wawancara, 9 Januari 2017).

Kutipan wawancara tersebut diketahui bahwa ada 3 program pemberdayaan petani kopi yang saat ini sedang berlangsung. Program pemberdayaan tersebut digolongkan menjadi dua pembagian. Yang pertama program pemberdayaan tersebut diarahkan kepada buruh (selaku penyortir kopi) pabrik itu sendiri yaitu dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Kemudian sejak tahun 2009 hingga sekarang program pemberdayaan selanjutnya diarahkan kepada kelompok tani dengan menyediakan bibit kopi unggulan, pemberian pupuk, pemberian peralatan pertanian seperti cangkul, parang, mesin pembersih rumput. Capaian tingkat keberhasilan daripada program pemberdayaan ini dapat dilihat dari persentase jumlah pengangguran saat ini hanya 35% dibandingkan

tahun-tahun sebelumnya. Serta program pemberdayaan yang terakhir adalah melakukan sosialisasi kepada kelompok tani

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Masniar menjelaskan bahwa :

“selaku buruh yang bekerja di Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayan Kabupaten Aceh Tengah, terlihat sangat jelas membantu masyarakat yaitu dengan mengurangi angka pengangguran dan membantu memperbaiki perekonomian dengan membuka lapangan pekerjaan”. (Wawancara, 9 Januari 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, keberadaan Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayan Kabupaten Aceh Tengah memperlihatkan adanya perubahan pada tatanan sosial perekonomian masyarakat. Terutama teratasinya masalah sosial yang menjadi salah satu pokok permasalahan di Indonesia yaitu pengangguran dengan menyediakan lapangan pekerjaan.

Tabel 4.3
Jumlah Tenaga Kerja Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayan

Tahun	Jumlah Pekerja	Gaji/Upah
2011	441	3.553.819.433
2012	425	3.455.981.235
2013	425	3.137.843.243
2014	241	3.295.263.205
2015	235	4.272.660.000
2016	262	4.744.320.000

Sumber : Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayan Kabupaten Aceh Tengah, 2018

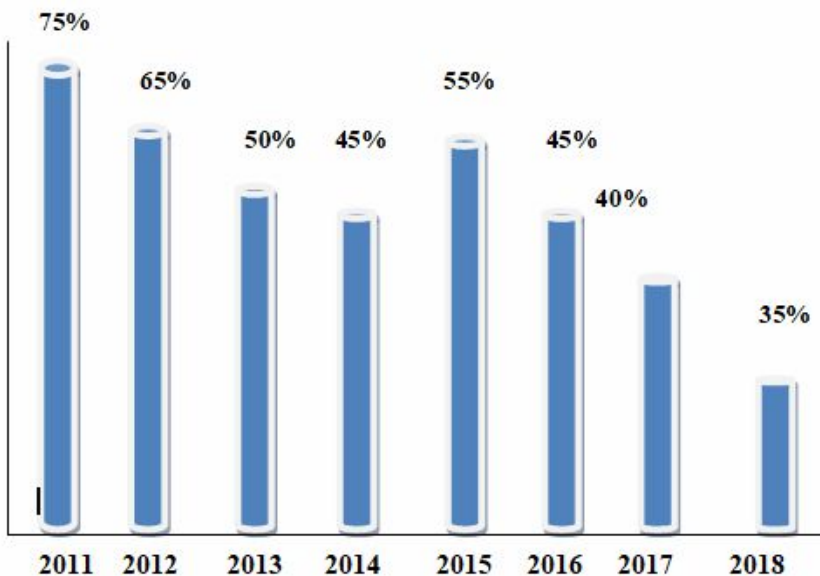
Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa jumlah tenaga kerja di Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayan Kabupaten Aceh Tengah setiap tahunnya mengalami penurunan. Ini menunjukkan bahwa bimbingan pihak Koperasi kepada masyarakat petani kopi berhasil, karena mereka sudah bisa mengelola lahan sendiri tanpa harus menjadi buruh sortir kopi di Koperasi.

Lebih lanjut mengenai bentuk pemberdayaan masyarakat petani kopi oleh Ibu Sulastris selaku penyortir kopi di Koperasi tersebut menjelaskan bahwa :

“Saya merasa perekonomian kami semakin membaik semenjak berdirinya Koperasi Baitul Qiradh Baburarrayan di Aceh Tengah terutama mengurangi angka pengangguran. Untuk sekarang jumlah penyortir kopi yang berada di meja sejumlah 100 orang, di bagian kompayer (mesin) berjumlah 200 orang. Ini merupakan langkah yang tepat untuk menanggulangi pengangguran”. (Wawancara, 9 Januari 2017).

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat merasa bersyukur dengan kehadiran Koperasi Baitul Qiradh Baburarrayan karena membantu mereka memenuhi kebutuhan ekonomi dengan menyediakan lapangan pekerjaan.

Gambar 4.1
Data Persentase Tingkat Pengangguran dari Tahun 2011
hingga 2018



Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa angka pengangguran di Kabupaten Aceh Tengah dari tahun 2011 hingga tahun 2018 mengalami penurunan. Angka pengangguran di tahun 2015 kembali meningkat ini disebabkan pada saat itu terjadi gempa bumi di Kabupaten Aceh Tengah yang menyebabkan banyak kebun petani kopi mengalami kerusakan dan gagal panen akibat longsor. Sehingga banyak masyarakat petani kopi yang menjadi pengangguran.

Sedangkan menurut petani kopi bapak Kamaluddin selaku kelompok tani Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayyan Kabupaten Aceh Tengah menjelaskan bahwa:

“Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayyan Kabupaten Aceh Tengah banyak memberikan kemudahan kepada masyarakat petani kopi. Namun ada hal yang sulit untuk dilaksanakan petani kopi yaitu dilarang menggunakan bahan kimia dalam pembasmian rumput karena berpengaruh terhadap kualitas kopi. Akan tetapi hal tersebut sulit terlaksana mengingat masyarakat masih mempunyai kesibukan lain. Sehingga dengan membasmii menggunakan bahan kimia adalah alternatif paling cepat. Sehingga masyarakat banyak melakukan hal tersebut secara diam-diam. Apabila diketahui oleh pihak koperasi akan dikeluarkan dari keanggotaan”. (Wawancara, 9 Januari 2017).

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang melanggar aturan tersebut. Masyarakat mengatakan bahwa hal tersebut akan akan memperlambat aktivitas mereka yang lain karena bukan hanya itu saja yang menjadi prioritas utamanya mereka. Aturan yang ditegakkan oleh Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayyan Kabupaten Aceh Tengah juga sangat ketat, terlihat dengan jelas bahwa bagi yang melanggar aturan tersebut akan dikeluarkan dari keanggotaan petani kopi.

Sedangkan menurut tokoh pengamat kopi sekaligus Duta Kopi Gayo Hendrika Fauzi menuturkan bahwa :

“Petani gayo sudah tergolong makmur namun belum termasuk sejahtera. Jika kita bandingkan dengan beberapa daerah penghasil kopi di Indonesia seperti Tapanuli Selatan yang belum dapat memenuhi kebutuhan ekonomi. Namun masyarakat gayo masing-masing mereka sudah mampu

membeli kendaraan dari hasil kopi tersebut dan tidak pernah kita temui bahwa masyarakat gayo menjadi peminta-minta di jalanan. Makmur artinya harga kopi gayo lebih tinggi daripada daerah lainnya ditambah lagi petani selalu dibina oleh pemda, cv, koperasi dan PT. Secara tidak langsung petani sudah diberikan peluang untuk sejahtera. (Wawancara, 8 Januari 2017).

Kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa masyarakat gayo sudah tergolong ke dalam masyarakat yang makmur namun belum sejahtera. Makmur dalam arti mereka sudah mampu memenuhi kebutuhan hidup dan mampu membeli barang yang menjadi keinginannya. Namun masih tergolong belum sejahtera karena mereka masih bergantung kepada pihak lain seperti tengkulak. Masyarakat menjual kopi kepada tengkulak dengan harga yang murah. Sifat masyarakat yang tidak mau direpotkan serta terbatasnya modal membuat harga jual kopi rendah. Begitu juga hasil panen kopi masyarakat menurun disebabkan karena kurangnya perawatan terhadap kopi.

4.1.2.3 Sosialisasi dan Pelatihan Bagi Anggota Kelompok Tani

Lebih lanjut mengenai bentuk pemberdayaan masyarakat petani kopi oleh bapak Rizwan Husin selaku ketua pengurus di Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan Aceh Tengah menjelaskan bahwa :

“Ada tiga faktor yang dapat menjadikan petani profesional, yaitu pengetahuan, keahlian dan moral. Ketiga faktor ini bisa dikuasai petani melalui proses dan tahapan pemberdayaan yang menggunakan sistem, strategi dan metode yang sesuai dengan spesifik lokal; menciptakan hubungan antara petani yang harmonis, kompak dan kebersamaan. Kondisi ini sangat diperlukan sebagai pendorong dan penumbuh semangat dalam melaksanakan segala aktifitas secara profesional. Untuk ini perlu adanya motifasi dan fasilitasi dalam mempersiapkan kelembagaan petani yang kuat dan berfungsi. Dalam kegiatan pemberdayaan petani selanjutnya dilakukan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Perusahaan Swasta CV. Aridalta Mandiri, yang membidangi perkebunan kopi bersertifikasi Standar Oprasional Prosedur Organik/Uzt

Certified, Kabupaten Aceh Tengah". (Wawancara, 10 Januari 2017).

Dari hasil wawancara di atas dapat dipaparkan bahwa Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan petani merupakan proses perubahan pola pikir dengan mempersiapkan SDM petani menjadi profesional, baik dalam teknis budidaya (Produksi), dalam penanganan panen, pasca panen, pemasaran dan pengelolaan organisasi. Untuk menumbuhkan kemitraan kalangan kelompok petani kopi dibangun dengan menjalin hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara dua pihak yang bermitra, juga dibangun kerjasama yang profesional dari pemberdayaan petani melalui sistem kebersamaan ekonomi adalah; petani menjadi pandai dan profesional, organisasi petani mandiri dan berfungsi melayani anggotanya, produktivitas kebun tinggi, pendapatan petani meningkat, terjalin hubungan harmonis antara petani, kelompok dan mitra usaha.

Dengan diselenggarakan pelatihan ini, dapat merubah pengetahuan, keterampilan dan sikap petani ke arah yang lebih baik khususnya peningkatan kemampuan SDM petani tentang pengolahan panen dan pasca panen, serta pemahaman tentang bisnis kopi yang berstandarkan Sertifikat Organik, Uzt Certified, juga akan pentingnya kerja sama dan komunikasi dalam bermitra. Untuk mendapatkan hasil pemberdayaan petani yang efektif, maka para petani yang telah mengikuti pelatihan tidak dibiarkan berjalan sendirian, tetapi senantiasa di dampingi, di fasilitasi dan dibimbing secara kontinyu dalam setiap tahapan pelatihan.

Bapak Rizwan Husin selaku ketua pengurus di Koperasi Baitul Qiradh Baburarrayan Aceh Tengah menjelaskan bahwa :

"Petani kopi yang mewakili dari setiap kecamatan dengan jumlah peserta 50 orang, masing-masing direkrut 10 orang dari setiap Kecamatan, mendapatkan pelatihan khusus dan berbagai materi yang didapatkan oleh petani. Materi yang disampaikan antara lain, cara perkebunan kopi yang baik, pengendalian dan pengurangan bahan kimia, pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan, pencegahan erosi serta penanganan panen dan pasca panen". (Wawancara, 10 Januari 2017).

Dengan Metode Pendidikan Orang Dewasa (POD), melalui partisipasi aktif seluruh peserta untuk memberikan kontribusinya dalam setiap tahapan proses dan spirit kebersamaan. Metode pelatihan ini dibantu dengan media; gambar, simulasi, curah pendapat dan cerita. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada petani tentang bagaimana cara mengelola hasil pertanian kopi yang baik dan benar agar kedepannya mampu menjawab kegelisahan petani tentang buruknya pasar kopi pada saat ini.

Selain itu petani diharapkan untuk kedepannya mampu menjaga kualitas kopi panen dan pasca panen dengan baik dan benar, karena apabila kopi dikelola dengan baik pastinya pasar kopi akan mengikuti bahkan kita bisa menembus pasar internasional. Harapannya dalam kegiatan ini mampu untuk menguatkan usaha tani dan membangun usaha komunitas sehingga pendapatan petani pun meningkat secara signifikan, dan mendorong petani membangun secara bersama melaksanakan konsolidasi sumber daya mereka guna terwujudnya usaha petani kopi yang sehat.

4.1.3 Kendala pemberdayaan petani kopi pada koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan Aceh Tengah

4.1.3.1 Kendala Rendahnya Harga Kopi

Kopi Gayo adalah satu diantara komoditi ekspor unggulan Indonesia yang telah dikenal di pasar domestik dan internasional. Kopi Gayo di Dataran Tinggi Gayo pada umumnya adalah kopi Arabika. Kopi Arabika sangat cocok untuk tumbuh di Dataran Tinggi Gayo yang memiliki letak geografis antara 3°45'0"LU-4°59'0"LU dan 96°16'10" BT-97°55'10"BT. Wilayah ini didominasi oleh ketinggian tempat antara 900 – 1700 m dpl yang merupakan habitat ideal untuk budidaya kopi Arabika.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Iwannitosa Putra selaku Humas di Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan Kabupaten Aceh Tengah mengenai harga kopi yang relatif rendah dan berubah beliau menjelaskan :

“Sebelum menentukan harga kopi, kita terlebih dahulu melihat kualitasnya. Kualitas yang baik akan mempengaruhi harga

jualnya juga. Selain itu, yang mempengaruhi nilai jual kopi yaitu terkait dengan kawasan kopi tersebut dibudidayakan. Contohnya seperti Kecamatan Batu Lintang merupakan daerah penghasil kopi nomor satu di Aceh Tengah. Dibandingkan dengan 13 kecamatan yang lain. Namun tidak kalah pentingnya kecamatan Bies merupakan daerah kedua penghasil kopi terbaik di Aceh Tengah, sehingga kedua kecamatan tersebut memiliki nilai jual kopi lebih tinggi dikarenakan biji kopi yang berkualitas". (Wawancara, 10 Januari 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan bapak Iwannitosa Putra selaku Humas Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayyan Kabupaten Aceh Tengah mengenai harga kopi dapat dijabarkan bahwa tidak semua kopi yang berada di Aceh Tengah memiliki kualitas yang bagus dan dapat mempertahankan nilai jualnya. Hanya ada beberapa kecamatan yang bisa mempertahankan mutunya yaitu kecamatan Batu Lintang sebagai Penghasil kopi terbaik nomor satu di Aceh Tengah, kemudian Kecamatan Bies memperoleh peringkat kedua sebagai daerah penghasil biji kopi berkualitas di Aceh Tengah.

Kemudian sekilas wawancara penulis dengan bapak Rizwan Husin selaku bagian pengurus di Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayyan Aceh Tengah menuturkan bahwa :

"Kami tidak sembarangan menentukan harga kopi. Harga tersebut ditentukan sesuai dengan kondisi fisik kopi itu sendiri. Apabila kopi tersebut memiliki mutu yang bagus dan unggulan. Kami tidak ragu untuk membelinya dengan harga yang mahal. Karena pada dasarnya kopi yang dibeli daripada masyarakat akan di ekspor ke luar negeri. Sehingga kepuasan konsumen luar negeri menjadi prioritas utama ketika produk kopi ini dipasarkan. Ini juga mempengaruhi hubungan kerja sama antara pemerintah Aceh Tengah dengan Luar Negeri" (Wawancara, 10 Januari 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rizwan Husin dapat disimpulkan bahwa Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayyan Aceh Tengah tidak akan membeli kopi dengan harga yang mahal tanpa pertimbangan yang matang. Pihak koperasi akan memberikan harga yang tinggi apabila mereka memang yakin dengan kualitas kopi tersebut. Terlebih lagi kopi tersebut bukan hanya akan dipasarkan di

dalam negeri melainkan hingga ke mancanegara sehingga kualitas merupakan hal yang diutamakan.

Kemudian Bapak Rizwan Husin juga menambahkan penjelasannya :

“Pihak Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan Aceh Tengah juga tidak hanya menuntut kualitas kopi tanpa memberikan bantuan kepada petani kopi agar hasil panen dapat meningkat. Pihak koperasi juga mengadakan penyuluhan kepada masyarakat untuk menjelaskan bagaimana seharusnya membudidayakan kopi agar hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Selain itu, banyak bantuan bercocok tanam yang diberikan, diantaranya seperti cangkul, mesin pemotong rumput pupuk, bibit unggulan”. (Wawancara, 10 Januari 2017).

Dikutip dari wawancara dengan Bapak Rizwan di atas dapat dijelaskan bahwa pihak Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan Aceh Tengah tidak hanya tinggal diam menunggu hasil panen kopi dari masyarakat dan menuntut kualitas kopi tersebut harus tinggi. Tetapi mereka juga mengusahakan langkah yang terbaik untuk memperlihatkan adanya hasil yang memuaskan. Terjadi hubungan simbiosis mutualisme antara pemerintah dengan masyarakat. Di samping menguntungkan pihak masyarakat selaku anggota kelompok tani juga memberikan keuntungan pihak Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan Aceh Tengah dengan semakin banyaknya permintaan kopi yang diekspor keluar karena kualitas yang memuaskan.

Selanjutnya ditanggapi oleh bagian pengawas di Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan Kabupaten Aceh Tengah yaitu Ibu Ismayanti, terkait perbedaan harga kopi yang sering berubah-ubah beliau pun menuturkan :

“Selain dari pada proses penanaman kopi yang mempengaruhi kualitas kopi tersebut. Hal yang paling penting adalah proses penggilingan hingga proses penjemuran dan seterusnya hingga menjadi gabah kopi. Apabila biji kopi yang dihasilkan banyak yang rusak (pesel) dan berwarna putih kehitam-hitaman maka kualitasnya kurang bagus. Kemudian saat proses pengeringan di bawah terik matahari, apabila kopi tersebut tidak kering sesuai standar dan mudah lapuk maka nilai jualnya rendah”. (Wawancara, 10 Januari 2017).

Dikutip dari wawancara bersama Ibu Ismayanti selaku tim pengawas lapangan yang memantau setiap kegiatan kelompok tani dari proses awal hingga akhir dapat dijelaskan bahwa. Harga satuan kopi tidak hanya ditentukan oleh daerah penghasil kopi yang terkenal subur. Namun prosesi awal hingga akhir saat kopi tersebut menjadi gabah merupakan hal yang perlu diperhatikan.

Kemudian sekilas wawancara penulis dengan bapak Mhd. Hanif selaku ketua pengawas di Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan Aceh Tengah menuturkan bahwa :

“Petani gayo sudah tergolong makmur namun belum termasuk sejahtera. Makmur artinya harga kopi gayo lebih tinggi daripada daerah lainnya ditambah lagi petani selau dibina oleh pemma, cv, koperasi dan PT. Masyarakat dikatakan belum makmur karena petani kopi masih bergantung pada pihak yang lain seperti tengkulak. Yang memanfaatkan membeli kopi masyarakat dengan harga murah karena petani di sana tidak mengolah biji kopi saat dijual kepada tengkulak yang menyebabkan harga jual kopi mereka rendah karena tidak ada nilai tambah. Karakter petani tidak mau repot serta terbatasnya modal membuat harga jual kopi di sana rendah. Selain itu petani juga melakukan penanaman ulang pohon kopi setelah 20 tahun yang seharusnya 10 tahun sehingga menyebabkan produktivitas kopi menurun. Tidak adanya penyuluhan, pemahaman bertani yang kurang, serta ketergantungan petani kepada tengkulak memperparah keadaan ini”. (Wawancara, 10 Januari 2017)

Kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa masyarakat gayo sudah tergolong ke dalam masyarakat yang makmur namun belum sejahtera. Makmur dalam arti mereka sudah mampu memenuhi kebutuhan hidup dan mampu membeli barang yang menjadi keinginannya. Namun masih tergolong belum sejahtera karena mereka masih bergantung kepada pihak lain seperti tengkulak. Masyarakat menjual kopi kepada tengkulak dengan harga yang murah. Sifat masyarakat yang tidak mau direpotkan serta terbatasnya modal membuat harga jual kopi rendah. Begitu juga hasil panen kopi masyarakat menurun disebabkan karena kurangnya perawatan terhadap kopi

4.1.3.2 Permainan Harga Oleh Toke Kopi yang Menyebabkan Pemberdayaan Petani Kopi Belum Maksimal

Permainan harga yang dilakukan oleh toke kopi merupakan hal yang sejak lama sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ini semua mendukung aksi toke kopi untuk memberdaya masyarakat yang tidak mau direpotkan mengolah kopi serta terbatasnya modal membuat harga jual kopi rendah. Masyarakat sering dirugikan karena toke kopi membeli kopi masyarakat petani kopi dengan harga rendah.

Berdasarkan pengakuan dari pada petani kopi Bapak Hasanuddin terkait dengan harga kopi yang merugikan masyarakat petani kopi beliau menjelaskan :

“Menurut saya masyarakat Gayo selaku pemilik kopi merupakan pihak yang dirugikan, memiliki kebun sendiri tetapi hanya sedikit merasakan keuntungan sedangkan toke kopi (kolektor kopi) merupakan pihak yang paling duntungkan. Pada waktu panen kopi, toke tersebut membeli kopi masyarakat dengan harga yang murah. Kolektor kopi memberikan imbalan boleh meminjam uang kepada toke tersebut. Namun pada saat panen berikutnya masyarakat harus menjual kembali kopinya kepada toke tersebut”. (Wawancara, 11 Januari 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik kebun Bapak Hasanuddin dapat dipaparkan bahwa yang menjadi kendala masyarakat saat memasarkan kopi adalah ketika masyarakat harus menjual kopi ke kolektor kopi dengan harga yang murah. Walaupun kolektor memberikan kemudahan yaitu berupa pinjaman dalam bentuk sejumlah uang. Namun hal tersebut tetap saja menyusahkan masyarakat secara perlahan-lahan.

Selanjutnya penjelasan oleh Bapak Yusuf selaku petani kopi :

“Masyarakat yang tidak tahu harus menjual kemana terpaksa harus menjual kepada toke tersebut walaupun dengan harga yang rendah. Pinjaman masyarakat yang sebelumnya juga harus dipotong setiap kali menjual hasil panennya. Kopi yang sudah terkumpul lalu diproses sehingga berbentuk menjadi biji kopi (gabah) kemudian dipasok ke setiap perusahaan kopi yang ada di Aceh Tengah sebelum diekspor ke luar negeri”. (Wawancara, 11 Januari 2017).

Dikutip dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat merasa terpaksa menjual kopi ke kolektor tersebut walaupun dengan harga yang murah karena mereka tidak tahu harus dipasarkan kemana.

Dilanjutkan wawancara penulis dengan Bapak Kamalluddin selaku anggota kelompok tani di Kecamatan Pegasing memamparkan bahwa :

“Perbedaan harga antara Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayan dengan di pedesaan relatif jauh berbeda. Berkisar antara Rp 3.000 hingga Rp. 4.000 sehingga masyarakat banyak yang dirugikan. Harga di Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayan Kabupaten Aceh Tengah berkisar antara Rp 30.000 sementara di tengah masyarakat berkisar antara Rp 25.000 hingga Rp. 26.000”. (Wawancara, 11 Januari 2017).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kamaluddin dapat dijelaskan bahwa harga antara Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayan Kabupaten Aceh Tengah dengan di pedesaan begitu jelas terlihat yaitu berkisar antara Rp 3.000 s/d Rp 4.000 atau sejumlah dengan Rp 30.000 di Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayan Kabupaten Aceh Tengah sementara harga di masyarakat senilai Rp 26.000.

Tabel 4.4
Daftar Harga Kopi di Kabupaten Aceh Tengah

No	Perbandingan tempat	Satuan harga per Kg
1	Koperasi Baitul Qiradh Babuprrayan	Rp. 30.000
2	Tengkulak/ Kolektor Kopi	Rp. 25.000

Sumber : Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayan, 2018

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terlihat jauh perbedaan harga kopi di Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayan dengan harga yang ditentukan oleh kolektor kopi. Selisih harga berkisar hingga Rp. 5.000.

4.1.3.3 Masyarakat Petani Kopi Bekerja Tidak Berdasarkan Aturan Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayyan Aceh Tengah

Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayyan Kabupaten Aceh Tengah memberlakukan aturan bahwa masyarakat petani kopi dilarang menggunakan perstisida ketika membasmi rumput karena berdampak pada kualitas kopi yang disebabkan oleh bahan kimia yang terkandung di dalam pestisida tersebut. Namun berdasarkan hasil pantauan tim delegasi dan pengawas dari Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayyan Aceh Tengah masih ditemukan adanya masyarakat yang melanggar aturan tersebut.

Terkait kendala dalam memberdayakan masyarakat petani kopi oleh Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayyan Aceh Tengah dijelaskan oleh Bapak Iwanitosa Putra selaku bagian humas Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayyan Aceh Tengah sebagai berikut:

“Ketika kami berkunjung ke kebun-kebun masyarakat yang tergabung ke dalam kelompok tani. Ada beberapa masyarakat menggunakan pestisida saat membasmi rumput. Pestisida merupakan produk yang dilarang digunakan karena bisa mempengaruhi kualitas kopi itu sendiri. Bahan kimia yang terkandung akan merusak jaringan batang dan daun sehingga selain berakibat pada kualitas kopi juga tingkat keberhasilannya tidak menjamin”. (Wawancara, 10 Januari 2017).

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang bekerja tidak sesuai arahan dan aturan yang telah ditetapkan oleh pihak Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayyan Aceh Tengah. Petani kopi dilarang menggunakan perstisida ketika membasmi rumput karena berdampak pada kualitas kopi yang disebabkan oleh bahan kimia yang terkandung di dalam pestisida tersebut. Kopi yang menggunakan pestisida (obat semprot) daunnya akan mengeriting, gabah kopi terlihat putih dan kopi yang dihasilkan pun lebih sedikit.

Kemudian wawancara dengan tim pegawai Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayyan Aceh Tengah yaitu ibu Ismayani terkait kendala dalam memberdayakan masyarakat petani kopi beliau pun menjelaskan sebagai berikut:

“Kebijakan yang dikeluarkan oleh Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan Kabupaten Aceh Tengah bagi yang menggunakan perstisida untuk membasmi rumput maka akan diberikan peringatan setelah itu apabila terbukti melakukan kesalahan lagi, pihak Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan Kabupaten Aceh Tengah akan mengeluarkan dari kelompok tani tersebut”. (Wawancara, 10 Januari 2017).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pihak Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan Aceh Tengah tidak ragu memberikan sanksi bagi siapa saja yang melanggar aturan yang telah disepakati sebelumnya. Apabila sekali melakukan pelanggaran maka masih diberikan peringatan. Namun apabila terbukti masih melakukan kesalahan yang sama maka akan dikeluarkan dari kelompok tani.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu pemilik kebun kopi di Aceh Tengah yaitu bapak Hasanuddin beliau menjelaskan bahwa :

“Sosialisai yang dilakukan kepada kelompok tani selama ini hasilnya belum terlihat efektif. Yang menjadi target sosialisasi itu adalah masyarakat luas pada umumnya yang akan menjual kopi kepada kolektor kopi namun yang sekarang ini hanya para kelompok tani saja yang menjalani proses sosialisasi tersebut sehingga belum tentu hal sama akan disampaikan pada masyarakat petani kopi”. (Wawancara, 10 Januari 2017).

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan Aceh Tengah belum memperlihatkan hasil yang efektif. Tujuan diadakannya sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat petani kopi bagaimana cara bercocok tanam kopi yang benar. Namun, selama ini sasaran sosialisasi itu hanya kepada kelompok tani yang sehingga informasi tersebut belum tentu tersampaikan kepada masyarakat luas.

Wawancara penulis dengan bapak Iwanitosa Putra selaku bagian humas Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan Aceh Tengah menjelaskan kembali terkait usaha sosialisasi yang dilakukan oleh Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan Aceh Tengah bahwa :

“Pihak Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan Kabupaten Aceh Tengah telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan bimbingan kepada masyarakat dengan cara mendatangi beberapa rumah yang tergabung ke dalam kelompok tani tersebut. Diharapkan dengan adanya langkah seperti ini memudahkan masyarakat untuk memahami apa yang disampaikan pemateri. Pemateri tersebut tidak hanya berasal dari daerah Aceh namun ada juga yang berasal dari luar negeri, sehingga kami menyediakan tim penerjemah untuk mempermudah dalam berkomunikasi”. (Wawancara, 10 Januari 2017).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas dapat dijabarkan bahwa walaupun demikian pihak Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan Aceh Tengah tidak berhenti melakukan usaha yang lain dalam memberikan arahan kepada masyarakat mengenai proses menanam dan merawat kopi. Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan Aceh Tengah berusaha mendatangi rumah ke rumah anggota kelompok tani dengan cara mengumpulkan beberapa perwakilan masyarakat guna memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat. Kemudian apabila tim pemateri tersebut berasal dari luar negeri maka pihak Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan Aceh Tengah memfasilitasinya dengan tim penerjemah agar mempermudah dalam berkomunikasi.

4.2 Pembahasan

4.2.1. Implementasi Program Pemberdayaan Petani Kopi di Aceh Tengah Pada Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan.

Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan individu-individu dan kelompok-kelompok pemerintahan yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan. Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa dengan dibentuknya Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan di Kabupaten Aceh Tengah yang bekerja sama dengan pemerintah daerah Aceh Tengah merupakan suatu langkah maju yang dilakukan pemerintah beserta koperasi dalam rangka memajukan kehidupan masyarakat petani kopi Kabupaten Aceh Tengah.

Ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu :

4. Adanya program atau kebijakan yang akan dilaksanakan contohnya dapat dilihat yaitu membentuk lapangan pekerjaan bagi masyarakat petani kopi sehingga membantu memperbaiki perekonomian masyarakat dan mengurangi angka pengangguran.
5. Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program. Ini dapat dilihat seperti anggota kelompok tani kabupaten Aceh Tengah yang menerima bimbingan, pelatihan dan sosialisasi langsung dari pihak Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayyan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membantu masyarakat mengelola perkebunannya.
6. Unsur pelaksana (implementator) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan atau pengawasan dari proses implemetasi tersebut. Ini dapat dilihat dengan dibentuknya pengurus dan pengawas di Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayyan Kabupaten Aceh Tengah yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat petani kopi. Seperti bagian pengawas diketuai oleh Rizwan Husin dan bagian pengawas diketuai oleh Mhd. Hanif.

4.2.1.1 Keanggotaan Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayyan Kabupaten Aceh Tengah dengan Membentuk Kelompok Tani

Keanggotaan kelompok tani Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayyan Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari anggota tetap, jumlah setiap anggota kelompok tani adalah 52 orang yang diketuai oleh 1 orang. Antara anggota dan ketua kelompok berbeda dalam pelaksanaan tugas. Ketua selaku kolektor kopi bertugas mengumpulkan kopi daripada anggotanya untuk disalurkan kepada Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayyan Kabupaten Aceh Tengah. Selain sebagai anggota kelompok tani, ada juga anggota kelompok tani dipercayakan menjabat sebagai tim delegasi yang membantu pihak Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayyan Kabupaten Aceh Tengah memantau setiap prosesi yang berlangsung di lapangan. Hasil

pantauan tersebut secara rutin beliau laporkan kepada Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayan Kabupaten Aceh Tengah. Apakah petani tersebut bekerja sesuai aturan dan arahan sebelumnya.

Penentuan jumlah anggota kelompok tani Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayan Kabupaten Aceh Tengah dilakukan oleh ketua kelompok itu sendiri. Bagi setiap anggota kelompok tani diwajibkan bekerja sesuai target yang sudah ditentukan oleh pihak Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayan Kabupaten Aceh Tengah yaitu menyuplai kopi ke koperasi sebanyak 1 ton dalam jangka waktu seminggu. Apabila mereka berhasil mencapai target yang telah ditentukan tersebut maka mereka akan diberikan *reward* (penghargaan) berupa uang tunai atau melakukan perjalanan ke luar kota. Semua ditanggung oleh Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayan Kabupaten Aceh Tengah.

4.2.1.2 Menyediakan Lapangan Pekerjaan untuk Masyarakat Setempat

Pada dasarnya pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Memberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang mempunyai akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan prikehidupan mereka.

Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus-menerus, proses partisipatif di mana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi, pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses. Pemberdayaan petani kopi yang dilaksanakan oleh Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayan bermacam-macam. Terdiri dari beberapa bentuk dan pembagian sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sehingga dengan adanya kerja sama berbagai pihak tujuan terberdayanya masyarakat secara signifikan dapat tercapai.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan mengenai pemberdayaan petani kopi yang dilakukan oleh Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan Kabupaten Aceh Tengah sudah bagus. Ini terlihat dari adanya beberapa program pemberdayaan yang saat ini sedang berlangsung yaitu dengan merangkul tenaga pekerja dan anggota kelompok tani dari masyarakat kabupaten Aceh Tengah sehingga angka pengangguran menurun. Kemudian melakukan bimbingan kepada masyarakat seperti pelatihan dan sosialisasi. Ada tiga program pemberdayaan petani kopi yang saat ini sedang berlangsung. Program pemberdayaan tersebut digolongkan menjadi dua pembagian. Yang pertama program pemberdayaan tersebut diarahkan kepada buruh (selaku penyortir kopi) pabrik itu sendiri yaitu dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Kemudian program pemberdayaan selanjutnya diarahkan kepada kelompok tani dengan menyediakan bibit kopi unggulan, pemberian pupuk, pemberian peralatan pertanian seperti cangkul, parang, mesin pembersih rumput dan melakukan bimbingan kepada masyarakat seperti pelatihan dan sosialisasi.

Program yang dilakukan oleh Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan Kabupaten Aceh Tengah begitu membantu perekonomian masyarakat. Ini terlihat dengan adanya perubahan pada tatanan sosial perekonomian pada masyarakat. Terutama teratasinya masalah sosial yang menjadi salah satu pokok permasalahan di Indonesia khususnya dan daerah pada umumnya. Di samping masalah pengangguran bisa teratasi, perekonomian masyarakat semakin stabil dengan adanya lapangan pekerjaan yang membantu masyarakat sekitar memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Keberhasilan program tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut. Indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat mencakup :

9. Jumlah warga yang secara nyata tertarik untuk hadir dalam tiap kegiatan yang dilaksanakan.
10. Frekuensi kehadiran tiap-tiap warga pada pelaksanaan tiap jenis kegiatan.

11. Tingkat kemudahan penyelenggaraan program untuk memperoleh pertimbangan atau persetujuan warga atas ide baru yang dikemukakan.
12. Jumlah dan jenis ide yang dikemukakan oleh masyarakat yang ditujukan untuk kebenaran pelaksanaan program.
13. Jumlah dana yang dapat digali dari masyarakat untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan.
14. Intensitas kegiatan petugas dalam pengendalian masalah.
15. Meningkatnya kepedulian dan respon terhadap perlunya peningkatan mutu hidup.
16. Meningkatnya kemandirian masyarakat.

Hasil temuan di lapangan mengenai kesulitan masyarakat mematuhi peraturan yang diberlakukan oleh Koperasi Baitul Qiradh Baburarrayan karena akan memperlambat aktivitas yang lain. Ini dapat dilihat dengan masih ada masyarakat yang melanggar aturan tersebut. Masyarakat mengatakan bahwa hal tersebut akan akan memperlambat aktivitas mereka yang lain karena bukan hanya itu saja yang menjadi prioritas utamanya mereka. Aturan yang ditegakkan oleh Koperasi Baitul Qiradh Baburarrayan Kabupaten Aceh Tengah juga sangat ketat, terlihat dengan jelas bahwa bagi yang melanggar aturan tersebut akan dikeluarkan dari keanggotaan petani kopi.

4.2.1.3 Sosialisasi dan Pelatihan Bagi Anggota Kelompok Tani

Pelatihan dan sosialisasi yang diberikan kepada petani kopi di dukung oleh tiga faktor sehingga membentuk petani yang profesional. Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan petani merupakan proses perubahan pola pikir dengan mempersiapkan SDM petani menjadi profesional, baik dalam teknis budidaya (Produksi), dalam penanganan panen, pasca panen, pemasaran dan pengelolaan organisasi.

Untuk menumbuhkan kemitraan dikalangan kelompok petani kopi dibangun dengan menjalin hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara dua pihak yang bermitra, juga dibangun kerjasama yang profesional dari pemberdayaan petani melalui

sistem kebersamaan ekonomi adalah; petani menjadi pandai dan profesional, organisasi petani mandiri dan berfungsi melayani anggotanya, produktivitas kebun lebih tinggi, pendapatan petani meningkat, terjalin hubungan harmonis antara petani, kelompok dan mitra usaha.

Dengan diselenggarakan pelatihan ini, dapat merubah pengetahuan, keterampilan dan sikap petani ke arah yang lebih baik khususnya peningkatan kemampuan SDM petani tentang pengolahan panen dan pasca panen, serta pemahaman tentang bisnis kopi yang berstandarkan Sertifikat Organik, Uzt Certified, juga akan pentingnya kerja sama dan komunikasi dalam bermitra. Untuk mendapatkan hasil pemberdayaan petani yang efektif, maka para petani yang telah mengikuti pelatihan tidak dibiarkan berjalan sendirian, tetapi senantiasa di dampingi, di fasilitasi dan dibimbing secara terus menerus dalam setiap tahapan pelatihan.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan mengenai pelatihan dan sosialisasi yang diberikan kepada petani kopi membantu petani untuk mengelola perkebunan dengan baik. Dengan Metode Pendidikan Orang Dewasa (POD), melalui partisipasi aktif seluruh peserta untuk memberikan kontribusinya dalam setiap tahapan proses dan spirit kebersamaan. Metode pelatihan ini dibantu dengan media; gambar, simulasi, curah pendapat dan cerita. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada petani tentang bagaimana cara mengelola hasil pertanian kopi yang baik dan benar agar kedepanya mampu menjawab kegelisahan petani tentang buruknya pasar kopi pada saat ini.

Selain itu petani diharapkan untuk kedepanya mampu menjaga kualitas kopi panen dan pasca panen dengan baik dan benar, karena apabila kopi dikelola dengan baik pastinya pasar kopi akan mengikuti bahkan kita bisa menembus pasar internasional. Harapannya dalam kegiatan ini mampu untuk menguatkan usaha tani dan membangun usaha komunitas sehingga pendapatan petani pun meningkat secara signifikan, dan mendorong petani membangun secara bersama melaksanakan konsolidasi sumber daya mereka guna terwujudnya usaha petani kopi yang sehat.

4.2.2. Kendala pemberdayaan petani kopi pada koperasi Baitul Qiradh Baburrrayyan Aceh Tengah

4.2.2.1 Kendala Rendahnya Harga Kopi

Kopi Gayo adalah satu diantara komoditi ekspor unggulan Indonesia yang telah dikenal di pasar domestik dan internasional. Kopi Gayo di Dataran Tinggi Gayo pada umumnya adalah kopi Arabika. Kopi Arabika sangat cocok untuk tumbuh di Dataran Tinggi Gayo yang memiliki letak geografis antara 3°45'0"LU-4°59'0"LU dan 96°16'10" BT-97°55'10"BT. Wilayah ini didominasi oleh ketinggian tempat antara 900-1700 m dpl yang merupakan habitat ideal untuk budidaya kopi Arabika.

Tidak semua kopi yang berada di Aceh Tengah memiliki kualitas yang bagus dan dapat mempertahankan nilai jualnya. Hanya ada beberapa kecamatan yang bisa mempertahankan mutunya yaitu kecamatan Batu Lintang sebagai Penghasil kopi terbaik nomor satu di Aceh Tengah, kemudian Kecamatan Bies memperoleh peringkat kedua sebagai daerah penghasil biji kopi berkualitas di Aceh Tengah. Kemudian Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayyan Aceh Tengah tidak akan membeli kopi dengan harga yang mahal tanpa pertimbangan yang matang. Pihak koperasi akan memberikan harga yang tinggi apabila mereka memang yakin dengan kualitas kopi tersebut. Terlebih lagi kopi tersebut bukan hanya akan dipasarkan di dalam negeri melainkan hingga ke mancanegara sehingga kualitas merupakan hal yang diutamakan.

Bantuan yang diberikan oleh Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayyan merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Dapat dilihat dari pihak Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayyan Aceh Tengah tidak hanya tinggal diam menunggu hasil panen kopi dari masyarakat dan menuntut kualitas kopi tersebut harus tinggi. Tetapi mereka juga mengusahakan langkah yang terbaik untuk memperlihatkan adanya hasil yang memuaskan.

Terjadi hubungan simbiosis mutualisme antara pemerintah dengan masyarakat. Di samping menguntungkan pihak masyarakat selaku anggota kelompok tani juga memberikan keuntungan pihak Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayyan Aceh Tengah dengan semakin

banyaknya permintaan kopi yang diekspor keluar karena kualitas yang memuaskan.

Perbedaan harga kopi yang sering berubah-ubah dan berbeda-beda memang jelas adanya. Ini terlihat dari proses awal hingga akhir dapat dijelaskan bahwa. Harga satuan kopi tidak hanya ditentukan oleh daerah penghasil kopi yang terkenal subur. Namun prosesi awal hingga akhir saat kopi tersebut menjadi gabah merupakan hal yang perlu diperhatikan.

Masyarakat gayo sudah tergolong ke dalam masyarakat yang makmur namun belum sejahtera. Ini dapat dilihat mereka sudah mampu memenuhi kebutuhan hidup dan mampu membeli barang yang menjadi keinginannya. Namun masih tergolong belum sejahtera karena mereka masih bergantung kepada pihak lain seperti tengkulak. Masyarakat menjual kopi kepada tengkulak dengan harga yang murah. Sifat masyarakat yang tidak mau direpotkan serta terbatasnya modal membuat harga jual kopi rendah. Begitu juga hasil panen kopi masyarakat menurun disebabkan karena kurangnya perawatan terhadap kopi.

4.2.2.2 Permainan Harga Oleh Toke Kopi yang Menyebabkan Pemberdayaan Petani Kopi Belum Maksimal

Untuk mengamati hasil pengamatan terhadap implementasi kebijakan. Model implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle memandang implementasi kebijakan oleh isi kebijakan dan konteks implemenasinya. Isi dari kebijakan merupakan faktor penting dalam menentukan hasil dan prakarsa implementasi, namun dikatakan oleh kondisi sosial dan ekonomi yang ada.

Variabel isi kebijakan mencakup :

- 1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* yang termuat dalam kebijakan. Ini dapat dilihat dari kepentingan tengkulak yang memanfaatkan masyarakat dengan cara membeli kopi dengan harga yang murah. Kemudian memberikan jaminan kepada masyarakat berupa pinjaman sejumlah uang, sehingga masyarakat yang tidak tahu menjual kemana terpaksa menjual kepada tengkulak tersebut.

- 2) Jenis atau manfaat yang diterima oleh *target group* (masyarakat); ini dapat dilihat dari program yang diterapkan Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayan Kabupaten Aceh Tengah yang mendapat respon baik dari masyarakat karena disamping masyarakat yang berlatarbelakang seorang petani kopi juga merasa cocok dan paham dengan program yang dilaksanakan tersebut. Contohnya dengan membentuk kelompok tani yang memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan berupa bantuan peralatan perkebunan seperti cangkul, alat pemotong rumput, pupuk kopi. Kemudian menyediakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat sebagai buruh sortir kopi di Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayan Kabupaten Aceh Tengah. Serta melakukan bimbingan kepada masyarakat bagaimana mengelola dan merawat kopi seperti pelatihan dan sosialisasi guna memperoleh hasil panen kopi yang memuaskan dan bernilai jual tinggi.
- 3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Ini dapat dilihat dari persentase tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Tengah yang kian tahun semakin berkurang. Kemudian masyarakat gayo juga merasa puas terhadap perekonomian yang kian stabil.
- 4) Apakah letak sebuah program sudah tepat berada pada posnya, lembaga atau sesuai dengan tupoksinya; ini jelas terlihat bahwa yang menjadi sasaran pemberdayaan tersebut adalah masyarakat petani kopi sehingga jelas ada perubahan ke arah yang lebih makmur lagi.
- 5) Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci; ini dapat dilihat dari pada visi, misi, tim pengawas dan pengurus di Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayan Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian kerja sama yang terjalin dengan beberapa asosiasi seperti yang disebutkan di bawah ini :
 - a) Kamar Dagang dan Industri (KADIN)
 - b) Asosiasi Ekportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI)
 - c) Asosiasi Kopi Specialty Indonesia (AKSI)
 - d) Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo (MPKG)
 - e) Forum Kopi Aceh (FKA)

- f) Asosiasi Producer Fairtrade Indonesia (APFI)
- g) Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)
- 6) adanya Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Sangat jelas terlihat bahwa program pemberdayaan ini berhasil di kalangan masyarakat karena didukung oleh masyarakat yang berprofesi sebagai petani kopi sehingga apa yang disampaikan oleh pihak Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayyan Kabupaten Aceh Tengah dan pemerintah daerah bisa diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat petani kopi.

Variabel lingkungan implementasi kebijakan mencakup :

- 1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
- 2) Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa;
- 3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle memandang implementasi dari konteks implementasinya. Sesuai poin yang pertama dapat dilihat besarnya kekuasaan dan kepentingan oleh para aktor yang terlibat. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh toke kopi ketika membeli kopi dari masyarakat. Mereka menentukan harga bukan semata-mata mempertimbangkan kualitas kopi melainkan mencari keuntungan dari masyarakat.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan terkait permainan harga oleh toke kopi ini memang benar adanya. Dapat dilihat bahwa yang menjadi kendala masyarakat saat memasarkan kopi adalah ketika masyarakat harus menjual kopi ke kolektor kopi dengan harga yang murah. Walaupun kolektor memberikan kemudahan yaitu berupa pinjaman dalam bentuk sejumlah uang. Namun hal tersebut tetap saja menyusahkan masyarakat secara perlahan-lahan. Ini dapat dibuktikan dengan harga antara Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayyan Kabupaten Aceh Tengah dengan di pedesaan begitu jelas terlihat yaitu berkisar antara Rp 3.000 s/d Rp 4.000 atau sejumlah dengan

Rp 30.000 di Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayyan Kabupaten Aceh Tengah sementara harga di masyarakat senilai Rp 26.000.

4.2.2.3 Masyarakat Petani Kopi Bekerja Tidak Berdasarkan Aturan Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayyan Aceh Tengah

Memberdayakan mengandung arti melindungi, sehingga dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah agar tidak bertambah lemah. Karena itu diperlukan strategi pembangunan yang memberikan perhatian yang lebih banyak dengan mempersiapkan lapisan masyarakat yang masih tertinggal dan hidup di luar dan di pinggiran jalur kehidupan modern sehingga tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi dan kemampuan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki, tetapi juga sekaligus meningkatkan kemampuan ekonomi nasional.

Terkait kendala dalam memberdayakan masyarakat petani kopi masih adanya ditemukan kejanggalan. Ini dapat dilihat bahwa masih ada masyarakat yang bekerja tidak sesuai arahan dan aturan yang telah ditetapkan oleh pihak Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayyan Aceh Tengah. Petani kopi dilarang menggunakan pestisida ketika membasmi rumput karena berdampak pada kualitas kopi yang disebabkan oleh bahan kimia yang terkandung di dalam pestisida tersebut. Kopi yang menggunakan pestisida (obat semprot) daunnya akan mengeriting, gabah kopi terlihat putih dan kopi yang dihasilkan pun lebih sedikit.

Kemudian pihak Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayyan Aceh Tengah tidak ragu memberikan sanksi bagi siapa saja yang melanggar aturan yang telah disepakati sebelumnya. Apabila sekali melakukan pelanggaran maka masih diberikan peringatan. Namun apabila terbukti masih melakukan kesalahan yang sama seperti melakukan pestisida ketika membasmi rumput maka akan dikeluarkan dari kelompok tani.

Sosialisasi yang belum maksimal dilakukan oleh Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayyan Aceh Tengah. Ini dapat dilihat belum adanya hasil yang efektif pada cara kerja masyarakat. Tujuan diadakannya sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat petani kopi bagaimana cara bercocok tanam kopi yang

benar. Namun, selama ini sasaran sosialisasi itu hanya kepada kelompok tani yang sehingga informasi tersebut belum tentu tersampaikan kepada masyarakat luas.

Walaupun demikian pihak Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan Aceh Tengah tidak berhenti melakukan usaha yang lain dalam memberikan arahan kepada masyarakat mengenai proses menanam dan merawat kopi. Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan Aceh Tengah berusaha mendatangi rumah ke rumah anggota kelompok tani dengan cara mengumpulkan beberapa perwakilan masyarakat guna memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat. Kemudian apabila tim pemateri tersebut berasal dari luar negeri maka pihak Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan Aceh Tengah memfasilitasinya dengan tim penerjemah agar mempermudah dalam berkomunikasi.

*

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi program pemberdayaan petani kopi yang dilakukan oleh Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayyan Kabupaten Aceh Tengah sudah bagus. Ini terlihat dari adanya beberapa program pemberdayaan. Diantaranya seperti membentuk keanggotaan kelompok tani yang menjadi sarana dan wadah untuk bertukar pikiran dan ide-ide kreatif antara pemerintah, masyarakat petani dan Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayyan Kabupaten Aceh Tengah dalam mengelola tanaman kopi. Kemudian menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat serta melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi anggota kelompok tani.
2. Kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan petani kopi di Aceh Tengah pada koperasi Baitul Qiradh Baburrrayyan adalah masih ada masyarakat yang bekerja tidak sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayyan Aceh Tengah yaitu berupa larangan memakai pestisida ketika membasmi rumput karena bisa merusak kualitas kopi tersebut. Kemudian harga satuan kopi yang berbeda-beda dan berubah-ubah dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti berdasarkan tempat kopi dibudidayakan, proses perawatannya hingga panen dan proses penggilingan kopi hingga penjemuran kopi.

5.2 Saran

1. Selaku Pemerintah Daerah Aceh Tengah yang mengharapkan adanya perubahan yang positif terhadap perekonomian masyarakat petani kopi. Sebaiknya pengawasan yang dilakukanpun lebih mendetil terhadap masyarakat petani kopi,

bukan hanya pengawasan dilakukan ketika proses perawatan kopi saja. Namun proses penjualanpun harus diperhatikan betul, karena banyak sekali masyarakat yang dimanfaatkan oleh kalangan tengkulak untuk menjual kopi mereka dengan harga yang murah. Setidaknya Pemerintah Daerah Aceh Tengah yang bekerja sama dengan Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayyan mampu memecahkan masalah ini. Sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan di ladang sendiri.

2. Selaku masyarakat yang berpendidikan dan tidak mau dirugikan lagi. Seharusnya hal ini bisa dijadikan pembelajaran bahwa untuk mendapatkan hasil yang lebih besar perlu usaha untuk memperolehnya. Seperti menginginkan harga kopi yang mahal sementara masyarakat malas mengolahnya dan hanya menggunakan cara instan lalu langsung menjualnya. Hal ini akan membuka peluang bagi tengkulak untuk memanfaatkan masyarakat kembali. Oleh karena itu jadilah masyarakat yang berpikir cerdas.

*

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutoro, Eko. (2004), *Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Yogyakarta: APMD Press.
- Moleong, Lexy. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nabuko, dkk. (2010). *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, Riant. (2011). *Public Policy*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Setiana, Lucie. (2004). *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Ghalia Indonesia: Bogor.
- Solichin, Abdul wahab. (2008). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press
- Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Suggono, Bambang (1994). *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. (2003). *Kebijakan Publik yang Mmembumi*, Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI .
- Tjokrowinoto, Mulyarto. (1996). *Pembangunan dan Tantangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Usman, Sunyoto. (2008). *Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wibawa, Samodra. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo

2. Undang-undang

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2014
"Pemerintahan Daerah"*

UU No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

3. Skripsi

Rizky, Aflia. (2016). *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Program Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG) (Studi di Gampong Batupat Barat Kota Lhokseumawe)*. Aceh Utara : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.

Mahyana, (2016). *Kinerja Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kopi di Kabupaten Aceh Tengah*. Aceh Utara : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.

4. Jurnal

Joko Mariyono dan Muhammad Atiq Zambani. (2015). Dampak Keberadaan Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Di Klaten-Jawa Tengah Pada Situasi Perekonomian Masyarakat *jurnal Manusia Dan Lingkungan*, Vol. 22, No.2, Juli 2015: 142-150.

5. Internet (website)

Putry, Ayunda. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat*, (<http://spesialpengetahuan.blogspot.com/2015/09/>), diakses,23/09/2016).

Rahmanto, Walid. (2011). *Pemberdayaan masyarakat*, (<http://walidrahmanto.blogspot.com/2011/12/>), Diakses, 23/09/2016.

RIWAYAT PENULIS

Dataran Tinggi Gayo merupakan daerah penghasil kopi Indonesia dan pengeksport biji kopi terbesar keempat di dunia, yang mampu menghasilkan sekitar 40% biji kopi jenis Arabica tingkat premium dari total panen kopi di Indonesia. Perkebunan Kopi yang telah dikembangkan sejak tahun 1908 berada di ketinggian 1200 m dari permukaan laut, dengan luas mencapai 48.300 ha dengan rata-rata produksi perhektar sebanyak Kg.720. Kopi merupakan salah satu hasil pertanian terbesar di Kabupaten Aceh Tengah, hal ini dapat dilihat hampir setiap orang mempunyai lahan kopi. Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah sangat bergantung pada tanaman kopi yang sudah mendunia ini.

Bertolak belakang dengan tujuan berdirinya koperasi yaitu memperlihatkan adanya suatu kemajuan pembangunan, perekonomian, dan terberdayanya masyarakat namun hal tersebut belum sesuai dengan realita yang terjadi di Kota Takengon. Meskipun berbagai sertifikasi dari dalam negeri maupun dari luar negeri sudah diperoleh terhadap kopi arabika Gayo, namun masih ada beberapa permasalahan.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui komoditas kopi Gayo, membutuhkan strategi maupun rencana yang matang dalam pengembangannya. Perlu adanya peran dari pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah, petani dan pengusaha perlu berjalan secara berkesinambungan. Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan Aceh Tengah merupakan salah satu koperasi kopi mempunyai peran penting dalam meningkatkan pendapatan petani kopi sampai sekarang ini. Berdasarkan latar belakang permasalahan dan data empiris yang telah penulis paparkan di atas. Maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk memperdalam kajian demi sebuah titik.

UNIMAL PRESS

ISBN 978-602-464-071-2

